



**PENYUSUNAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN JOMBANG**



LAPORAN AKHIR



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

bekerjasama dengan

**PUSAT PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS (P4A)
FAKULTAS PERTANIAN - UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG**

JOMBANG - TAHUN 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan perkenan-Nya-lah buku *Laporan Akhir Kegiatan Riset Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2010* ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Jombang khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami serta kepada semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya penyusunan laporan hasil penelitian ini. Kami juga memohon maaf apabila masih banyak terdapat kurang-sempurnaan dan kekhilafan dalam penyusunan laporan ini

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga laporan ini dapat menjadi masukan dan inspirasi bagi perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan manusia di Kabupaten Jombang pada masa-masa yang akan datang.

Jombang, 2010

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan	3
1.4. Sasaran	4
1.5. Ruang Lingkup	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Kerangka Teoritis	6
2.2. Visi dan Misi Kabupaten Jombang	11
2.3. Arah Kebijakan Pembangunan	14
BAB III METODOLOGI	20
3.1. Metode Pengumpulan Data	20
3.2. Metode Perhitungan IPM	21
3.3. Metode Analisis Data	25
3.4. Metode Pengambilan Sampel	28
VAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	31
4.1. Kondisi Geografis dan Demografis	31
4.2. Kondisi Sektor Perekonomian	34
4.3. Kondisi Sektor Pendidikan	41
4.4. Kondisi Sektor Kesehatan	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	49
5.1. Karakteristik Responden	49
5.2. Hasil Perhitungan IPM Kabupaten Jombang	50
5.3. Hasil Perhitungan IPM Kecamatan	68
5.4. Peta Sebaran Daerah Tertinggal	79
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	88
6.1. Kesimpulan	88
6.2. Rekomendasi	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	3.1.	Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM	21
Tabel	3.2.	Jnjang Pendidikan dan Skor	23
Tabel	3.3.	Nama Desa Lokasi Pengambilan Sampel	30
Tabel	4.1.	PDRB Kabupaten Jombang Tahun 2006 - 2009	36
Tabel	4.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2004 - 2009	37
Tabel	4.3.	Perkembangan Inflasi Kabupaten Jombang Tahun 2006 - 2009	37
Tabel	4.4.	PDRB ADHK Kabupaten Jombang Tahun 2006 - 2009	38
Tabel	4.5.	Prosentase Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Jombang	40
Tabel	4.6.	APBD Kabupaten Jombang Tahun 2007 - 2009	41
Tabel	4.7.	Rasio Guru - Murid dan Sekolah di Kabupaten Jombang Tahun 2009	43
Tabel	4.8.	Perkembangan APM dan APK di Kabupaten Jombang Tahun 2008 - 2009	44
Tabel	4.9.	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) Maternal di Kabupaten Jombang Tahun 2006 - 2009	46
Tabel	4.10.	Sarana Kesehatan di Kabupaten Jombang Tahun 2009	46
Tabel	4.11.	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap 100.000 penduduk	47
Tabel	5.1.	Sebaran Sampel Penelitian	50
Tabel	5.2.	IPM Kabupaten Jombang Tahun 2010 dan 2009	53
	5.3.	Hasil Perhitungan Shortfall	54
Tabel	5.4.	Hasil Perhitungan Reduksi Shortfall Indeks Harapan Hidup(Eo), Indeks Tingkat Pendidikan (TP) dan Indeks PPP	56
Tabel	5.5.	Korelasi antara Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Indeks PPP di Kabupaten Jombang Tahun 2004 - 2010	58
Tabel	5.6.	Korelasi antara PDRB perKapita Atas Dasar Harga Berlaku dengan Indeks PPP di Kabupaten Jombang Tahun 2004 - 2010	59

Tabel	5.7.	IPM Kecamatan se Kabupaten Jombang Tahun 2010	69
Tabel	5.8.	Indeks Harapan Hidup Kecamatan Se Kabupaten Jombang Tahun 2010	74
Tabel	5.9.	Indeks Tingkat Pendidikan Kecamatan Se Kabupaten Jombang Tahun 2010	76
Tabel	5.10.	Indeks Kemampuan Daya Beli (PPP) Kecamatan Se Kabupaten Jombang Tahun 2010	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1.	Diagram Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	10
	5.1.	Posisi Relatif Kabupaten Jombang terhadap Propinsi Jawa Timur	57
	5.2.	Posisi Relatif Kecamatan terhadap Kabupaten Jombang (IPM 2010 & PDRB ADHB 2007	72
	5.3.	Peta Sebaran Daerah Tertinggal di bidang IPM	80
	5.4.	Peta Sebaran Daerah Tertinggal di bidang Indeks Harapan Hidup	82
	5.5.	Peta Sebaran Daerah Tertinggal di bidang Indeks Tingkat Pendidikan	83
	5.6.	Peta Sebaran Capaian Indeks AMH Kecamatan Se Kabupaten Jombang	84
	5.7.	Peta Sebaran Daerah Tertinggal di bidang Indeks M Y S	85
	5.8.	Peta Sebaran Capaian Indeks PPP Kecamatan Se Kabupaten Jombang	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

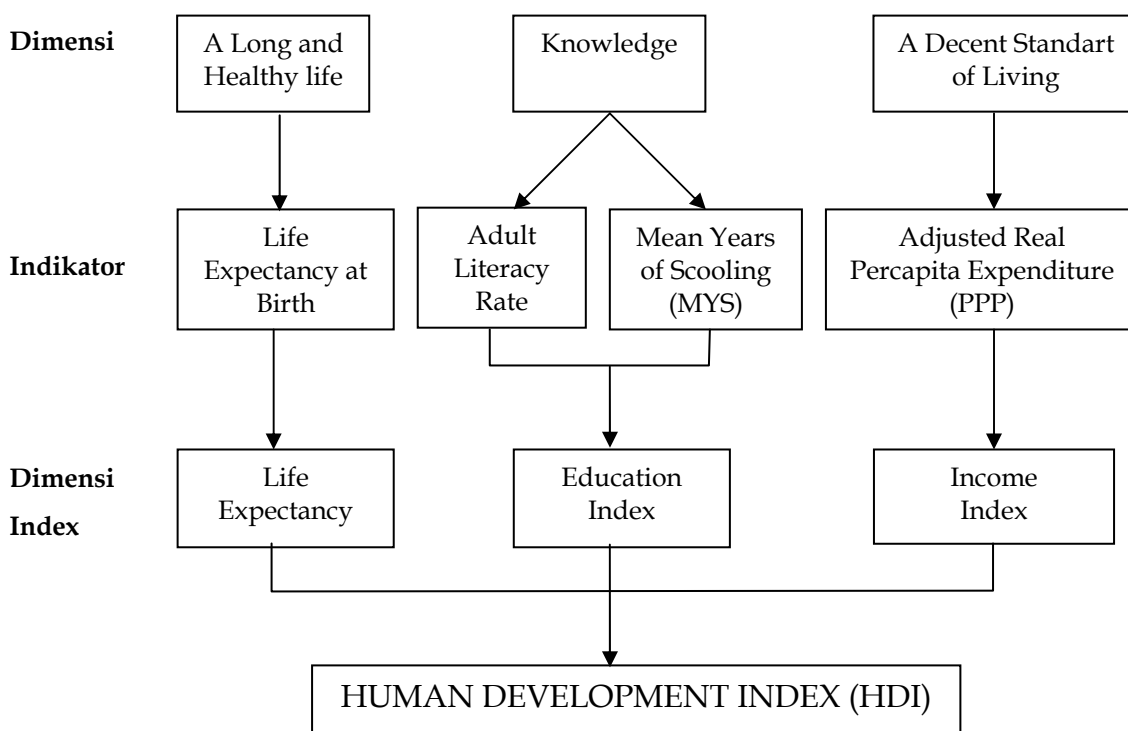
Pembangunan nasional adalah usaha untuk meningkatkan kualitas manusia seutuhnya, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan dan transformasi menuju kondisi yang lebih baik khususnya pada aspek kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah Republik Indonesia saat ini telah memberikan komitmen tinggi dalam hal peningkatkan kualitas sumber daya manusia ini. Dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) telah mensyaratkan dipenuhinya 10 hak dasar manusia dalam upaya memberantas kemiskinan. Pemerintah Indonesia juga telah menyetujui Millenium Development Goals (MDG's) yang membahas berbagai aspek fundamental dalam pembangunan manusia yang telah dicanangkan oleh PBB di awal milenium baru.

Indonesia juga telah meratifikasi hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Internasional Pembangunan Manusia yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Copenhagen tahun 1995. KTT itu telah mengeluarkan 10 rekomendasi dan kesepakatan prinsip-prinsip utama di bidang pembangunan manusia yang ditandatangani oleh 117 Presiden dan Kepala Pemerintahan termasuk Presiden Republik Indonesia. Indonesia pun baru-baru ini telah mengeluarkan dua Undang-Undang berkaitan dengan pengesahan Konvenan Interasional tentang Hak-

sebagai akibat (dampak) dari krisis ekonomi yang menurunkan daya beli masyarakat.

Secara ringkas konsepsi indeks pembangunan manusia (IPM) dapat dijelaskan oleh diagram berikut ini :



Gambar 2.1. Diagram Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konstruksi IPM yang dijabarkan dalam indikator-indikator diatas merupakan cermin ukuran keberhasilan dan atau kegagalan pembangunan kesehatan dan kependudukan, pendidikan, serta ekonomi suatu bangsa. Implikasinya IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, kependudukan, pendidikan dan ekonomi di suatu negara. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan kegagalan pembangunan kesehatan, kependudukan, pendidikan dan ekonomi di suatu negara.

Hak Sipil dan Politik dan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Komitmen yang sama juga diperlihatkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2009-2013 menyiratkan akan perlunya menghitung IPM, hal ini juga selaras dengan salah satu prioritas kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang yakni peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi telah dirancang dan diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, sebagai pengejawantahan amanat pembangunan dalam kurun waktu setahun terakhir. Bertambahnya tenaga, fasilitas dan anggaran di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program-program pembangunan tersebut tentunya akan menyebabkan perubahan kondisi variabel sosial ekonomi masyarakat yang pada akhirnya juga akan mendorong pergeseran angka IPM di Kabupten Jombang. Pergeseran IPM di tingkat lokal juga dimungkinkan terjadi akibat perubahan kondisi masyarakat di tingkat nasional dan global.

Atas dasar itulah maka kegiatan penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jombang tahun 2010 menjadi penting guna mendukung dan sekaligus memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya di Kabupaten Jombang dan pembangunan nasional pada umumnya.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti maka diperlukan suatu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berapakah besaran angka IPM di Kabupaten Jombang berikut faktor pembentuknya, kemudian bagaimanakah perbandingannya dengan daerah lain dan tahun-tahun sebelumnya?
2. Bagaimanakah kaitan antara besaran angka IPM dengan besaran pertumbuhan ekonomi?
3. Bagaimanakah peta sebaran (*mapping*) daerah-daerah tertinggal dalam bidang pembangunan manusia di Kabupaten Jombang?
4. Faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya angka IPM pada daerah tersebut serta bagaimanakah alternatif solusinya dalam perencanaan pembangunan?.

1.3. TUJUAN

Secara umum, tujuan penyusunan Indeks Pembangunan manusia Kabupaten Jombang adalah tersusunnya laporan dan dokumen indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Jombang. Sedangkan secara khusus tujuan penyusunan indeks pembangunan manusia (IPM) adalah sebagai berikut :

1. Menghitung besaran IPM dan faktor pembentuknya di Kabupaten Jombang, kemudian dibandingkan dengan daerah lain dan tahun-tahun sebelumnya.
2. Mengetahui kaitan antara besaran IPM dengan besaran pertumbuhan ekonomi.

3. Menghasilkan sebuah peta sebaran (*mapping*) yang berisi daerah-daerah tertinggal dalam bidang pembangunan manusia.
4. Mengetahui sebab-sebab daerah tertinggal di bidang IPM dan alternative solusinya dalam perencanaan pembangunan.

1.4. SASARAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Diketuinya tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan besaran komponen unsur pembentuk indeks pembangunan manusia
2. Tersedianya alternatif rekomendasi kebijakan intervensi perbaikan sektoral berdasarkan kewilayahan dan disparitas kesejahteraan

1.5. RUANG LINGKUP

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) adalah variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk sebagai akibat dari perluasan akses atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Dimana dalam hal ini IPM tersusun dari 3 (tiga) komponen utama yakni angka harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks pendapatan.

Oleh karena itulah ruang lingkup dari kegiatan penelitian ini adalah menghitung besaran IPM dan faktor-faktor penyusunnya dengan lokasi penelitian di Kabupaten Jombang. Setelah itu berdasarkan besaran IPM yang didapatkan, dilakukan analisis untuk mengetahui sebaran daerah-daerah yang masih tertinggal dalam bidang pembangunan manusia. Juga dilakukan

perbandingan secara deskriptif kualitatif antara tingkat pencapaian IPM Kabupaten Jombang dibandingkan dengan daerah lainnya dan tahun-tahun sebelumnya, Dalam penelitian ini juga akan digambarkan secara kualitatif kaitan antara besaran IPM yang diperoleh dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

Dimensi “manusia” dalam pembangunan, pada dasawarsa terakhir ini muncul sebagai salah satu isu utama yang telah “mendunia”, yakni terkait dengan menguatnya desakan dari berbagai kalangan pemerhati pembangunan masyarakat yang mempertanyakan kembali tujuan pembangunan yang dinilai kurang berorientasi pada manusia (*human*) dan hak-hak asasinya.

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dewasa ini seringkali dilihat dari pencapaian kualitas Sumber Daya Manusianya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan) sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan dengan sendirinya meningkat.

Pembangunan Manusia menurut UNDP (*united nation development programme*) diartikan sebagai “suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk” yang elemen-elemennya secara tegas menggaris bawahi sasaran yang ingin dicapai, yaitu : “hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan dan dapat menikmati hidup layak” (UNDP-1994).

Kecenderungan menguatnya isu strategis yang terkait dengan pembangunan manusia tersebut seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat serta semakin terbukanya arus informasi dan komunikasi dalam era globalisasi dan persaingan global.

Model pembangunan manusia menurut UNDP tersebut dapat ditumbuhkembangkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Pemberdayaan penduduk dapat dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya dan politik.

Produktivitas, pemerataan, keseimbangan, dan pemberdayaan merupakan empat hal pokok yang menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia memiliki dua sisi yang harus seimbang. Sisi pertama adalah peningkatan kapabilitas fisik penduduk seperti perbaikan derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan keterampilan; sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia mencakup sisi produksi maupun distribusi dari berbagai komoditi dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya upaya pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi menumbuhkan kesempatan kerja yang menjadi jembatan yang menghubungkan pembangunan manusia dengan pembangunan ekonomi.

Besarnya alokasi anggaran untuk pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat menunjukkan komitmen pemerintah bagi upaya pembangunan manusia. Pembangunan bidang kesejahteraan rakyat akan meningkatkan kapasitas fisik dan kapasitas intelektual penduduk. Begitu pula pembangunan ekonomi secara nyata akan mendorong meningkatnya pendapatan penduduk.

Sebagai fokus dan sasaran akhir pembangunan, informasi mengenai kualitas pembangunan manusia sangatlah penting diketahui.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang paling banyak digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur taraf kualitas fisik penduduk. Indeks ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990. Sejak itu penghitungan berkembang dengan penggabungan berbagai indikator yang menggambarkan aspek-aspek pembangunan manusia. Indeks ini menghitung rata-rata pencapaian pembangunan manusia dalam bentuk nilai dan menghasilkan peringkat antar wilayah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu ;

- a. Umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup.
- b. Berpengetahuan dan berketerampilan, serta
- c. Akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

IPM yang dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya, yaitu :

- a. Angka harapan hidup waktu lahir (eo).
- b. Pencapaian tingkat pendidikan, yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta
- c. Standar hidup layak yang diukur dengan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan.

Di Indonesia *concern* atas isu tersebut mulai muncul dan menjadi prioritas perhatian pada awal Repelita I melalui penetapan Strategi Pembangunan Nasional dengan penekanan pada “pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan sumber daya manusia”. Dalam kerangka ini, pembangunan manusia seutuhnya menjadi tujuan utama pembangunan nasional melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia, agar mampu berperan sebagai subyek pembangunan.

Dengan berbagai modifikasi yang diperlukan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bekerjasama dengan BPS dan UNDP pada tahun 1997 telah mengembangkan perhitungan IPM hingga tingkat kabupaten/kota. Upaya itu tidak berhenti hanya pada perhitungan saja, tetapi justru pembangunan daerah, dari perhitungan angka IPM kabupaten/kota pada tahun 1996 angka tertinggi adalah 77,2 Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dan terendah 38,9 Kabupaten Licuisa, Propinsi Timor Timur (sebelum melepaskan diri dari RI).

Menurut Soni Sumarsono & Sahat Marulitua (2003), IPM yang dikembangkan dalam skala internasional tersebut, sangat tepat bila digunakan untuk membandingkan kualitas hidup antar tempat dan antar waktu. Di Indonesia, indeks tersebut telah dikembangkan dalam skala propinsi dan kabupaten/kota, sehingga memungkinkan kita melihat perbandingan IPM antar propinsi dan antar kabupaten/kota, bahkan antar wilayah kecamatan.

Berdasarkan penghitungan nilai-nilai komponen IPM sebagaimana uraian tersebut diatas, nilai IPM dapat dipergunakan untuk menentukan posisi/peringkat tiap-tiap wilayah/kecamatan. Dengan demikian setiap wilayah/kecamatan dapat melakukan berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai angka ideal. Pencapaian angka IPM di suatu daerah seringkali menjadi acuan bagi berhasil atau tidaknya proses pembangunan yang telah berjalan.

IPM dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia. Namun demikian perlu disadari bahwa IPM (sebagai indeks komposit) hanya dapat memperlihatkan perbandingan antar daerah (propinsi atau kabupaten/kota) dan perkembangan antar waktu. Karena itu, perlu juga dilihat komponen-komponen yang membentuk IPM tersebut sehingga diketahui pencapaian dari setiap komponen. Kepekaan IPM sebagai alat ukur terbukti dengan menurunnya IPM suatu Wilayah

Menurut Soni Sumarsono & Sahat Marulitua (2003), IPM yang dikembangkan dalam skala internasional tersebut, sangat tepat bila digunakan untuk membandingkan kualitas hidup antar tempat dan antar waktu. Di Indonesia, indeks tersebut telah dikembangkan dalam skala propinsi dan kabupaten/kota, sehingga memungkinkan kita melihat perbandingan IPM antar propinsi dan antar kabupaten/kota, bahkan antar wilayah kecamatan.

Dengan pemanfaatan IPM, pembangunan nasional maupun daerah diharapkan lebih aspiratif dan mampu mengakomodasikan dimensi “manusia” dengan lebih baik dan terarah. Dalam konteks pembangunan daerah, IPM juga dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran utama serta bahan rujukan untuk merumuskan rencana kebijakan pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik dasar yakni pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan dan pembangunan infrastruktur social ekonomi.

2.2. Visi dan Misi Kabupaten Jombang

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Berpijak atas dasar kondisi obyektif serta perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka telah ditetapkan visi Kabupaten Jombang yaitu : *“Terwujudnya masyarakat Jombang yang sejahtera, agamis dan berdaya saing berbasis agribisnis”*

Dalam rumusan visi Kabupaten Jombang terdapat kata kunci yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Sejahtera*, adalah suatu kondisi masyarakat di mana dengan kemampuan dan kompetensinya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kesejahteraan adalah juga cita-cita dan kebutuhan masyarakat di mana perwujudannya merupakan tanggungjawab seluruh stakeholders pembangunan. Berdasarkan konsep tersebut, maka yang menjadi titik kritis adalah pemberdayaan dan peningkatan kemampuan masyarakat sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya.
- b. *Agamis*, adalah suatu kondisi di mana agama berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam setiap aktivitas masyarakat, sehingga dapat tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Disamping itu, agamis juga menunjukkan kesadaran masyarakat akan budaya luhur yang dimiliki Kabupaten Jombang sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif.
- c. *Berdaya saing*, adalah suatu kondisi di mana Kabupaten Jombang mempunyai keunggulan komparatif maupun kompetitif sebagai jembatan untuk dapat mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdaya saing juga berarti kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan global, baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional.

d. *Berbasis agribisnis*, adalah terintegrasinya semua aspek pembangunan pertanian, mulai dari sektor industri hulu pertanian, pertanian primer, industri hilir pertanian, dan jasa-jasa penunjang yang berkaitan secara simultan dan harmonis.

Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun misi Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Mewujudkan pemerintahan yang baik, mengandung makna penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah daerah yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintah daerah yang profesional, efektif, berkompetensi tinggi serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengandung arti mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta agar pembangunan di Kabupaten Jombang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkompetensi tinggi dan mempunyai keunggulan kompetitif, mempunyai integritas dan jatidiri masyarakat santri yang dipandu oleh nilai-nilai luhur budaya dan agama.

Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis, mengandung arti mengembangkan daerah dengan memperkuat perekonomian

daerah yang berbasis pada kekuatan sektor pertanian dan produk unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menumbuhkan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan; serta memantapkan program penanggulangan kemiskinan.

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, mengandung arti pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (sustainable development).

2.3. Arah kebijakan pembangunan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- Untuk mencapai sasaran meningkatnya kemampuan pembiayaan pembangunan ditetapkan kebijakan memantapkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan perencanaan kebijakan APBD, penajaman prioritas anggaran, pengelolaan resiko fiskal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran;
- Untuk mencapai sasaran efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan kebijakan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan standardisasi sistem pengelolaan keuangan daerah;
- Untuk mencapai sasaran meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana pemerintahan daerah ditetapkan kebijakan revitalisasi sarana dan prasarana pemerintahan daerah;
- Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah ditetapkan kebijakan meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian, meningkatkan etos kerja aparatur pemerintah daerah, meningkatkan kualitas layanan kepegawaian, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan aparatur pemerintah;
- Untuk mencapai sasaran terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien ditetapkan kebijakan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola

- pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas perancangan peraturan perundang-undangan daerah;
- Untuk mencapai sasaran meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan ditetapkan kebijakan meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat desa di dalam sistem pembangunan daerah;
 - Untuk mencapai sasaran meningkatnya akses informasi masyarakat terhadap kebijakan dan program-program pembangunan ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas akses informasi oleh masyarakat dan meningkatkan kualitas manajemen sistem informasi kebijakan dan program-program pembangunan;
 - Untuk mencapai sasaran meningkatnya usia harapan hidup ditetapkan kebijakan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - Untuk mencapai sasaran meningkatnya akses pelayanan kesehatan ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan cakupan layanan kesehatan masyarakat,
 - Untuk mencapai sasaran meningkatnya cakupan pemeliharaan kesehatan ditetapkan kebijakan meningkatkan akses masyarakat terhadap jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - Untuk mencapai sasaran meningkatnya sarana prasarana pendidikan ditetapkan kebijakan meningkatkan kuantitas layanan pendidikan;
 - Untuk mencapai sasaran meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan ditetapkan kebijakan pengembangan manajemen berbasis sekolah dan kurikulum berbasis potensi lokal;

- Untuk mencapai sasaran meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar ditetapkan kebijakan memperluas akses pendidikan bermutu dengan biaya terjangkau;
- Untuk mencapai sasaran terwujudnya sarana dan prasarana dasar yang memadai bagi masyarakat ditetapkan kebijakan meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman,
- Untuk mencapai sasaran meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL) ditetapkan kebijakan meningkatkan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat dan endorog percepatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
- Untuk mencapai sasaran terwujudnya fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika di dalam pembangunan ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama dan kehidupan beragama dan meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama,
- Untuk mencapai sasaran mantapnya ketahanan pangan ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pangan dan mendorong upaya peningkatan pendapatan petani;
- Untuk mencapai sasaran terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh ditetapkan kebijakan menumbuhkembangkan industri kecil menengah berbasis agribisnis, peningkatan daya saing produk pertanian dan

mengembangkan sistem kemitraan agribisnis yang saling menguntungkan;

- Untuk mencapai sasaran meningkatnya sistem infrastruktur penunjang agribisnis ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penunjang agribisnis;
- Untuk mencapai sasaran meningkatnya investasi usaha mikro, kecil, dan menengah ditetapkan kebijakan meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah;
- Untuk mencapai sasaran terwujudnya sistem investasi daerah yang efektif dan efisien ditetapkan kebijakan meningkatkan kondusivitas iklim investasi di daerah;
- Untuk mencapai sasaran terwujudnya klaster-klaster agribisnis di Kabupaten Jombang ditetapkan kebijakan mengembangkan ekonomi wilayah berbasis sumberdaya lokal;
- Untuk mencapai sasaran terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan ditetapkan kebijakan meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, meningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam, meningkatkan upaya penanganan daerah rawan bencana alam dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau perkotaan,
- Untuk mencapai sasaran terwujudnya kelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat;

Berdasarkan dokumen RKP Tahun 2009 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009, serta RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013, maka pada tahun 2009 tema RKPD Kabupaten Jombang

yang ditetapkan adalah “Memperkuat Kesetiakawanan Sosial dalam Efektivitas Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”

Dengan tema tersebut maka pembangunan di Kabupaten Jombang diprioritaskan pada:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat;
2. Memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pertanian;
3. Akselerasi pembangunan desa;
4. Pemantapan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan dan pelayanan publik.

Adapun strategi pembangunan Kabupaten Jombang adalah menekankan pada:

1. Membangun kesetiakawanan sosial masyarakat dalam upaya bersama untuk menanggulangi kemiskinan;
2. Optimalisasi pelayanan dasar masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyusun standar pelayanan;
3. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kerakyatan.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

- Peningkatan target pendapatan daerah, baik langsung maupun tak langsung secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan potensi dan kondisi di lapangan;
- Diversifikasi pendapatan daerah dengan memperkuat proses komunikasi dan kampanye publik guna membangun kepercayaan dan tanggung jawab publik
- Mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah

- Penguatan efektivitas dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan serta pencitraan kesetiakawanan sosial;
- Fasilitasi permodalan dan pelayanan usaha bagi pertumbuhan sektor riil dan UMKM;
- Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya kesehatan, pendidikan dan pangan;
- Pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pertanian;
- Percepatan pembangunan desa;
- Inisiasi dan perwujudan Ketahanan Pangan Daerah;
- Optimalisasi kinerja sumberdaya aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya berdasarkan pada sasaran yang harus dicapai, pencapaian kinerja, masalah dan tantangan pokok pembangunan, serta tema dan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan;
- Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan;
- Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan kewirausahaan;
- Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastuktur;
- Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- Peningkatan pemerintahan yang baik.

BAB III

METODOLOGI

3.1. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi atas data primer (yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri secara langsung dari obyek penelitian) dan data skunder (data yang dikumpulkan peneliti secara tidak langsung atau menggunakan sumber lain).

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*). Interview adalah teknik pengumpulan data dengan jalan tatap muka langsung (*face to face*) antara pewawancara/pencacah dengan responden. Untuk meminimalisir kelemahan teknik interview maka dalam melakukan wawancara petugas dipandu dengan instrument berupa daftar pertanyaan/*questionare*.

Data primer diperoleh melalui metode sensus dan metode *sampling*. Data yang disensus adalah menyangkut harga-harga kebutuhan rumah tangga di masing-masing pasar pada 21 kecamatan. Sedangkan data pengeluaran rumah tangga, wanita usia produktif 15-45 tahun dalam kelompok lima tahunan, angka lahir hidup, angka lahir mati, diperoleh melalui *sampling* dengan unit responden rumah tangga. ,

Sedangkan data skunder yang diperlukan sebagai pendukung antara lain adalah RPJMPD, RTRW, APBD, PDRB, data kependudukan, kesehatan, pendidikan, keluarga prasejahtera didapatkan dari berbagai instansi yang terkait.

3.2. Metode Perhitungan IPM

Sebagaimana diuraikan dimuka, bahwa untuk menghitung IPM dibutuhkan tiga komponen, yaitu angka harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks pendapatan. Model perhitungan yang digunakan berdasarkan konsepsi/rumusan bersama Dirjen Bina Pembangunan Daerah, BPS dan UNDP (1997) adalah sebagai berikut:

Pada tahap pertama, perhitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen atau indikator IPM, dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Indeks}(i) = \frac{(X(i) - \min X(i))}{(\max X(i) - \min X(i))}$$

Dimana :

I(i) = Indeks komponen IPM ke i (I = 1,2,3)

X(i) = Nilai Indikator IPM ke i

maks X(i) = Nilai maksimum X(i), (lihat tabel dibawah ini)

min X(i) = Nilai minimum X(i), (lihat tabel dibawah ini)

Persamaan 1) ini akan menghasilkan $0 < X_i < 1$, untuk mempermudah membaca, skala dinyatakan dalam 100 (artinya persamaan 1 dikalikan 100), sehingga diperoleh hasil $0 < X_i < 100$.

Tabel. 3.1. Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Indikator Komponen IPM

Indikator	Nilai Maks	Nilai Min	Catatan
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global UNDP
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai standar global UNDP
Purchasing Power Parity	732.720*	300.000**	UNDP menggunakan GDP per-kapita riil yang disesuaikan

Sumber : Siti Mardiyah (2001)

Catatan :

* Proyeksi = riil PPP adj untuk Jakarta tahun 2018 berdasarkan asumsi kenaikan 6,5% selama kurun waktu 1993-2018

** Setera dengan dua kali garis kemiskinan Sulawesi Selatan daerah pedesaan, tahun 1990.

Tahap kedua perhitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks I(i) dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{IPM} &= \frac{\sum I(i)}{3} \\ &= \frac{[I(1) + I(2) + I(3)]}{3} \end{aligned}$$

Dimana :

I (1) = Indeks Harapan Hidup

I (2) = Indeks Pendidikan

= 2/3 (Indeks Melek Huruf) + 1/3 (Indeks Rata-rata Lama Sekolah)

I (3) = Indeks Konsumsi per kapita yang telah disesuaikan

Keterangan :

I(1) = INDEKS HARAPAN HIDUP

UNDP memilih indikator harapan hidup waktu lahir = e^0 . karena pada kenyataannya dilapangan, data/informasi kematian menurut usia/umur tidak tersedia dengan baik di administrasi desa, maka digunakan metode tidak langsung, yaitu berpedoman pada :

1. Rata-rata anak yang dilahirkan hidup
2. Rata-rata anak yang masih hidup per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan, dan perhitungannya menggunakan "*Mortpack Life*".

I(2) = INDEKS PENDIDIKAN

= 2/3 (Indeks Melek Huruf) + 1/3 (Indeks Rata-Rata Lama Sekolah),

Dengan rumus :

$$I(\text{Lit}) = \frac{\{X(\text{Lit}) - \min X(\text{Lit})\}}{\{\max X(\text{Lit}) - \min X(\text{Lit})\}}$$

$$I(\text{MYS}) = \frac{\{X(\text{MYS}) - \min X(\text{MYS})\}}{\{\max X(\text{MYS}) - \min X(\text{MYS})\}}$$

Dimana :

1. Angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*)
X (Lit) = %
2. Rata-rata lama sekolah (MYS)

$$\text{MYS} = \frac{\sum f_1 \times S_1}{\sum f_1}$$

Dimana :

- f1 = Frekuensi penduduk yang berumur 10 tahun ke atas
 S1 = Skor masing-masing jenjang pendidikan i.
 i = Jenjang pendidikan (i=1,2,...,7)

Tabel 3.2. Jenjang Pendidikan dan Skor

Jenjang Pendidikan	Skor
Tidak / Belum pernah sekolah	0
Belum tamat SD	3
Tamat SD	6
Tamat SMP	9
Tamat SMA	12
Tamat D III	15
Tamat D IV / Sarjana	16,5

I (3) = INDEKS KONSUMSI PERKAPITA yang telah disesuaikan (*Purchasing Power Parity* atau PPP atau kemampuan daya beli)

PPP atau “paritas daya beli” yang juga dimasukkan sebagai unsur IPM secara konseptual lebih lengkap dalam merefleksikan taraf pembangunan manusia. Dasar perhitungan PPP yang digunakan oleh UNDP adalah *Gross National Product* (GNP), yang telah disesuaikan dengan

angka riil oleh *International Comparison Project* (ICP) sehingga dapat dibandingkan.

Untuk mengukur daya beli penduduk antar daerah, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan ini telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, dengan menggunakan data hasil survei. Hasil perhitungan dikalikan 12 untuk memperoleh angka tahunan.
2. Menghitung nilai pengeluaran riil (E), yaitu dengan membagi rata-rata pengeluaran dengan IHK pada tahun yang bersangkutan.
3. Menghitung PPP (unit) semacam faktor pengali R, untuk menghilangkan perbedaan harga antar daerah.
4. Menghitung nilai PPP dalam rupiah (Y*) dengan rumus :

$$Y^* = \frac{E}{R}$$

Dimana :

Y* = PPP (rupiah)

E = Pengeluaran per tahun dalam harga konstan

R = PPP (unit)

5. Menghitung penyesuaian PPP (rupiah) dengan formula Atkinson (Y**)

$$\begin{aligned}
Y^{**} &= Y^* && \text{jika } Y^* < Z \\
&= Z + 2(Y^* - Z)^{1/2} && \text{jika } Z < Y^* < 2Z \\
&= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(Y^* - 2Z)^{1/3} && \text{jika } 2Z < Y^* < 3Z \\
&= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(Z)^{1/3} + 4(Y^* - 3Z)^{1/4} && \text{jika } 3Z < Y^* < 4Z
\end{aligned}$$

Dimana :

Y^* = PPP dari nilai riil pengeluaran perkapita

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp. 549.500,- per kapita setahun atau Rp.1.500 per kapita per hari

(Sumber : BPS, 2008, Publikasi No.07320.0801)

3.3. Metode Analisis Data

Analisis merupakan proses terakhir dalam rangkaian tugas penelitian, sebelum peneliti menuliskan hasil laporannya. Analisis dilakukan agar tujuan penelitian, yaitu menjawab berbagai pertanyaan dan rumusan masalah serta membuktikan hipotesis (jika ada). Disamping itu, analisis bertujuan untuk menjelaskan fenomena, kejadian atau perilaku, atau untuk menerangkan apa yang menjadi latar belakang fenomena, kejadian atau perilaku itu, baik yang mengenai seseorang/individu, sekelompok orang atau masyarakat.

Selanjutnya, sebagaimana pada uraian dimuka, bahwa IPM merupakan indeks komposit (indeks gabungan) yang terdiri dari tiga komponen atau indikator utama, yaitu indeks angka harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan.

Apabila komponen-komponen IPM telah diketahui begitu pula cara perhitungannya, maka untuk memahami makna angka yang didapatkan dilakukanlah analisis data. Secara umum analisis data IPM dapat ditelusuri melalui tingkatan status dan tingkat pertumbuhannya (Siti Mardiyah, 2001).

Berdasarkan kajian aspek status pembangunan manusia, tinggi rendahnya status pembangunan manusia menurut UNDP dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Tingkatan *rendah*, jika $IPM < 50$.
- b. Tingkatan *menengah*, jika $50 \leq IPM < 80$.
- c. Tingkatan *tinggi*, jika $IPM \geq 80$.

Namun untuk perbandingan antar daerah di Indonesia, yaitu perbandingan antar kabupaten/kota, maka kriteria kedua, yaitu “Tingkatan menengah”, dipecah menjadi 2 (dua) golongan, sehingga gambaran status akan berubah menjadi sebagai berikut :

- a. Tingkatan *rendah*, jika $IPM < 50$
- b. Tingkatan *menengah-bawah*, jika $50 \leq IPM \leq 66$
- c. Tingkatan *menengah-atas*, jika $66 < IPM < 80$
- d. Tingkatan *atas*, jika $IPM \geq 80$

Sedangkan berdasarkan kajian aspek tingkat pertumbuhannya, IPM dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan pembangunan, melalui 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Perbandingan Antar Wilayah. Yaitu suatu posisi relatif dari satu wilayah terhadap wilayah yang lain berdasarkan peringkatnya dalam suatu kawasan tertentu.
- b. Pengukuran Tingkat Kemajuan. Yaitu untuk mengkaji pencapaian tingkat kemajuan capaian setelah berbagai program diimplementasikan dalam suatu periode tertentu, yang dinotasikan kedalam rumus reduksi shortfall per tahun (*annual reduction shortfall*).

Menurut Sugiarto & Abuzar, angka perhitungan “Shortfall” dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \left[\frac{IPM(t+n) - IPM(t)}{IPM(ideal) - IPM(t)} \right] \times 100$$

Dimana :

- r = reduksi shortfall
- IPM_(t) = IPM tahun ke t
- IPM_(t+n) = IPM tahun ke t + n
- IPM_(ideal) = IPM acuan = 100

Semakin besar reduksi shortfall (r) di suatu wilayah menunjukkan semakin besar kemampuan yang dicapai oleh wilayah tersebut dalam periode tertentu. Kecepatan pencapaian dalam hal ini mengukur perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus (seharusnya) ditempuh untuk mencapai titik ideal IPM, yakni IPM = 100.

Kecepatan pencapaian = r, terbagi kedalam 4 (empat) tingkatan :

- a. Kecepatan Pencapaian "Sangat Lambat", jika $r < 1,30$
- b. Kecepatan Pencapaian "Lambat", jika $1,30 < r < 1,50$
- c. Kecepatan Pencapaian "Menengah", jika $1,50 < r < 1,70$
- d. Kecepatan Pencapaian "Cepat", jika $r > 1,70$

Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas dibuat peta sebaran (*mapping*) daerah-daerah yang tertinggal dalam bidang pembangunan manusia serta dilakukan analisa deskriptif kualitatif untuk mengetahui penyebab ketertinggalan itu. Selain itu juga dilakukan analisa deskriptif kualitatif untuk mengetahui kaitan antara besaran IPM dengan besaran pertumbuhan ekonomi.

3.4. Metode Pengambilan Sampel

Dengan mempertimbangkan bidang penelitian, tingkat homogenitas populasi serta tingkat presisi data maka teknik yang digunakan untuk pengambilan *sampling* adalah menggunakan pendekatan acak kluster (*cluster random sampling*). Jumlah sample untuk pengumpulan data primer (survey) dalam kegiatan penelitian ini adalah sejumlah 840 responden rumah tangga yang tersebar pada 42 (empat puluh dua) desa di 21 (dua puluh satu) kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang.

Dari masing-masing kecamatan diambil secara acak kluster satu desa yang berkategori desa-desa dan satu desa yang berkategori desa-kota. Kemudian pada setiap desa diambil 20 rumah tangga sebagai responden. Penentuan responden dilakukan secara acak dengan memperhatikan kluster pekerjaan responden menurut Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KLUI) 2005 dan Klasifikasi baku jenis pekerjaan Indonesia 2002 yang diterbitkan oleh sub direktorat statistik ketenaga kerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kegiatan SAKERNAS 2009.

Adapun desa yang terpilih sebagai lokasi pengambilan sampel disusun berdasarkan klasifikasi sistem dan fungsi perwilayahan yang tertuang dalam dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang tahun 2009-2029 dan klasifikasi status desa (perkotaan dan pedesaan) yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Jombang.

Dalam dokumen RTRW tersebut disebutkan bahwa tata ruang wilayah Kabupaten Jombang dibagi menjadi 5 (lima) Wilayah Pengembangan (WP) yakni:

1. WP Jombang meliputi wilayah administrasi Kecamatan Jombang, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Jogoroto dan Kecamatan Diwek.
2. WP Mojoagung meliputi wilayah administrasi Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito, dan Kecamatan Kesamben
3. WP Ploso meliputi wilayah administrasi Kecamatan Ploso, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan Plandaan
4. WP Bandar Kedungmulyo meliputi wilayah administrasi Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Perak, dan Kecamatan Gudo
5. WP Mojowarno meliputi wilayah administrasi Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng, dan Kecamatan Ngoro

Selanjutnya dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa kawasan peruntukan permukiman dirinci menjadi kawasan pusat permukiman perkotaan dan kawasan pusat permukiman pedesaan dengan penjelasan status hirarkinya sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ataupun sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

Berdasarkan klasifikasi tersebut diatas kemudian dilakukan pemilihan secara acak (*random*) untuk masing-masing kecamatan. Adapun desa yang terpilih sebagai lokasi sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Nama Desa Lokasi Pengambilan Sampel

No	KECAMATAN	STATUS DESA	
		PERKOTAAN	PEDESAAN
1	Jombang	Jombang	Sumberjo
2	Peterongan	Peterongan	Bongkot
3	Diwek	Diwek	Watugaluh
4	Jogoroto	Jogoroto	Sumbermulyo
5	Sumobito	Sumobito	Bakalan
6	Mojoagung	Gambiran	Murukan
7	Mojowarno	Mojowarno	Latsari
8	Bareng	Banjar Agung	Pulosari
9	Wonosalam	Wonosalam	Wonomerto
10	Ngoro	Ngoro	Sugihwaras
11	Gudo	Gudo	Godong
12	Perak	Perak	Kepuhkajang
13	Bandar Kedung Mulyo	Bandar Kedung Mulyo	Banjarsari
14	Tembelang	Pesantren	Kepuhdoko
15	Kesamben	Kesamben	Kedungbetik
16	Megaluh	Megaluh	Ngogri
17	Ploso	Ploso	Kebon Agung
18	Kabuh	Kabuh	Marmoyo
19	Kudu	Kudu Banjar	Made
20	Ngusikan	Ngusikan	Asemgede
21	Plandaan	Plandaan	Klitih

Sumber : Data skunder, diolah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1. Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Jombang terletak di perlintasan jalur selatan jaringan jalan Jakarta - Surabaya. Secara geografis, Kabupaten Jombang berada di antara 112° 20' 01" dan 112° 30' 01" Bujur Timur dan antara 07° 20' 01", dan 07° 45' 01" Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.159,50 Km². Ibukota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian ± 44 m.d.p.l.

Kabupaten Jombang berbatasan dengan batas administratif wilayah - wilayah berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk.

Secara administrasi, Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 302 desa dan 4 Kelurahan serta 1.258 dusun. Apabila ditinjau dari komposisi jumlah desa/kelurahan maka Kecamatan Sumobito memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 21 buah.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang merupakan wilayah datar hingga bergelombang. Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Perak Kecamatan Gudo, Kecamatan Diwek, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Jodoroto, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Kesamben, dan Kecamatan Ploso berada pada kemiringan lahan 0 - 2%.

Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Jombang berada pada kemiringan 0 - 5%. Kecamatan Kecamatan Kabuh berada pada kemiringan 0 - 40%. Kecamatan Bareng, Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan Plandaan merupakan kecamatan yang mempunyai kemiringan bervariasi dari datar hingga terjal 0- >40%. Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Kudu dan Kecamatan Ngusikan merupakan wilayah yang berada pada kategori bergelombang hingga terjal.

Berdasarkan ciri fisik tanah yang ada di Kabupaten Jombang dapat di bagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Kabupaten Jombang bagian utara adalah bagian dari pegunungan kapur yang memiliki tanah relatif kurang subur, sebagian besar mempunyai fisiografi yang mendatar dan sebagian lagi berbukit-bukit tetapi tidak terlalu tajam, yang terletak di sebelah utara sungai Brantas.
2. Kabupaten Jombang bagian tengah di bagian selatan sungai Brantas sebagian besar merupakan tanah pertanian dengan sungai-sungai dan daerah irigasi yang tersebar dan cocok untuk pertanian.
3. Kabupaten Jombang bagian selatan merupakan tanah pegunungan yang cocok untuk dimanfaatkan untuk daerah perkebunan.

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Jombang sebagian besar digunakan untuk areal sawah sebesar 43,21%, untuk permukiman/perumahan sebesar 24,03%, hutan sebesar 19,46%, tegal sebesar 11,74%, dan penggunaan lainnya sebesar 1,56%.

Kabupaten Jombang memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata 20^o-34^o C. Menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson, Kabupaten Jombang termasuk tipe iklim B (basah). Curah hujan

rata-rata per tahun adalah 1.800 mm. Berdasarkan peluang curah hujan tahunan, wilayah Kabupaten Jombang tergolong beriklim sedang sampai basah. Di bagian tenggara dan timur, curah hujan sedikit lebih besar.

Wilayah Kabupaten Jombang merupakan daerah hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Selain itu juga dilalui oleh dua aliran sungai besar yang merupakan sub DAS Brantas yaitu Sungai Konto dan Sungai Gunting. Oleh karena itu tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian cukup memadai yaitu dengan rata-rata pemenuhan kebutuhan air sebesar 101,50 % di musim hujan, 98,40 % di musim kemarau I dan 95,10 % di musim kemarau II.

Pemenuhan kebutuhan air ini digunakan untuk mengairi lahan pertanian berupa lahan sawah teknis sebesar 44.923 ha atau 38,74% dari luas Kabupaten Jombang. Dengan terpenuhinya kebutuhan air tersebut maka potensi pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan sangat memungkinkan untuk dilakukan.

Sedangkan gambaran umum aspek demografis, berdasarkan hasil registrasi jumlah penduduk Kabupaten Jombang sampai dengan Desember tahun 2009 sebanyak 1.348.199 jiwa, terdiri dari 675.584 laki-laki dan 672.615 perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Jombang sebanyak 148.544 jiwa, diikuti dengan Kecamatan Diwek sebanyak 113.923 jiwa dan Kecamatan Mojowarno sebanyak 93.932 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Ngusikan sebanyak 22.911 jiwa, diikuti dengan Kecamatan Kudu sebanyak 31.915 jiwa dan Kecamatan Wonosalam sebanyak 35.651 jiwa.

Tingkat Kepadatan penduduk Kabupaten Jombang sebesar 1.163 jiwa/km². Sedangkan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Jombang sebesar 4.079 jiwa/km², diikuti dengan Kecamatan Diwek sebesar 2.382 jiwa/km² dan Kecamatan Jogoroto sebesar 2.388 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan daerah pegunungan yaitu Kecamatan Wonosalam sebesar 293 jiwa/km², kecamatan Plandaan sebesar 318 jiwa/km², Kecamatan Kudu sebesar 411 jiwa/km², dan Kecamatan Kabuh sebesar 435 jiwa/km².

Sex ratio merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan dikalikan seratus. Pada tahun 2009, sex ratio penduduk Kabupaten Jombang sebesar 100,44%, yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

4.2. Kondisi Sektor Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sendiri diukur berdasarkan perhitungan nilai tambah barang dan jasa pada sembilan sektor usaha yang dominan di masyarakat, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa.

Dalam rentang waktu 4 (empat) tahun terakhir berdasarkan data dari BPS Propinsi Jawa Timur perkembangan PDRB Kabupaten Jombang baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal

ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai tambah barang dan jasa yang diindikasikan dengan peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari Rp. 9,2 trilyun pada tahun 2006 menjadi Rp. 13,3 trilyun pada tahun 2009. Selain itu struktur perekonomian wilayah Kabupaten Jombang juga semakin kokoh yang diindikasikan dengan semakin naiknya PDRB atas dasar harga konstan (tahun 2000) yaitu sebesar Rp. 5,3 trilyun pada tahun 2006 menjadi Rp.6,3 trilyun pada tahun 2009.

Secara rinci perkembangan PDRB Kabupaten Jombang tahun 2006 - 2009 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.1. PDRB Kabupaten Jombang Tahun 2006-2009

Tahun	PDRB		
	ADHB (juta rupiah)	ADHK Th. 2000 (juta rupiah)	Perkapita ADHB (ribu rupiah)
2006	9.263.748,13	5.362.056,95	7.338,82
2007	10.526.529,01	5.690.034,12	8.289,52
2008	12.057,455,86	6.028.426,07	9.377,84
2009	13.319.116,53	6.331.124,50	10.233,99

Sumber ; BPS Propinsi Jawa Timur, 2010

Pada sisi lain, peran PDRB Kabupaten Jombang terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 sebesar 1,87% juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007 dan 2008 yaitu sebesar 1,86%.

Pertumbuhan ekonomi daerah tidak bisa terlepas dari perkembangan pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional. Fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala regional maupun nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah. Laju pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2009 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami sedikit penurunan, yaitu dari sebesar 5,95% pada tahun 2008 menjadi

sebesar 5,02% pada tahun 2009. Hal ini terjadi diduga sebagai akibat dari adanya pengaruh krisis global sehingga mengakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan di beberapa bidang. Faktor lainnya diduga adalah akibat pergeseran kondisi iklim dan cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan penurunan hasil panen pertanian. Namun demikian secara umum kondisi perekonomian makro Kabupaten Jombang masih cukup baik, karena masih mampu memberikan pertumbuhan yang positif selama tahun 2009 bahkan perekonomian wilayah Kabupaten Jombang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Jawa Timur.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi per tahun Kabupaten Jombang tahun 2007- 2009 dapat digambarkan secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2004-2009

TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
2006	5,60
2007	6,12
2008	5,95
2009	5,02

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, 2010

Di sisi yang lain berdasarkan data dari BAPPEDA Kabupaten Jombang tahun 2009, kondisi inflasi di wilayah Kabupaten Jombang menunjukkan indikasi kecenderungan yang cukup baik, khususnya sejak tahun 2007 bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sempat menyentuh angka 2 digit. Bahkan sejak tahun 2007 tingkat inflasi di Kabupaten Jombang dapat dikatakan selalu menunjukkan angka di bawah tingkat inflasi Jawa Timur. Bahkan pada tahun 2009, berdasarkan angka sementara

inflasi di Kabupaten Jombang tercatat sebesar 4,79%, sedikit di atas angka inflasi nasional sebesar 4% dan inflasi Provinsi Jawa Timur sebesar 3%, namun jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Kabupaten Jombang tahun 2008 yang tercatat sebesar 9,42%. Hal ini sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3. Perkembangan Inflasi Kabupaten Jombang Tahun 2006-2009

TAHUN	INFLASI (%)
2006	10.41
2007	7,17
2008	9,42
2009	4.79

Sumber: BAPPEDA Kab. Jombang, 2010

Struktur perekonomian di wilayah Kabupaten Jombang sejak tahun 2006, masih didominasi oleh sektor-sektor dominan yang selama ini menjadi penyangga utama struktur perekonomian di wilayah Kabupaten Jombang yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa. Namun demikian terlihat bahwa peranan keempat sektor tersebut telah mengalami pergeseran. Pada tahun 2009 terlihat bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran mulai menggeser dominasi sektor pertanian.

**Tabel 4.4. Proporsi PDRB ADHK Kabupaten Jombang
Tahun 2006-2009**

No.	SEKTOR	PROPORSI PDRB ADHK (%)			
		2006	2007	2008	2009
1	Pertanian	32,51%	31,81%	31,20%	30,54%
2	Pertambangan dan penggalian	1,67%	1,63%	1,59%	1,57%
3	Industri pengolahan	11,58%	11,43%	11,24%	11,39%
4	Listrik, gas dan air bersih	1,10%	1,10%	1,09%	1,12%
5	Bangunan	2,17%	2,09%	2,02%	1,98%
6	Perdagangan, hotel dan restoran	30,97%	31,76%	32,56%	33,79%
7	Angkutan dan komunikasi	3,92%	4,01%	4,10%	4,10%
8	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	3,91%	3,96%	3,98%	4,04%
9	Jasa-jasa	12,18%	12,21%	12,22%	12,16%

Sumber: BAPPEDA Kab. Jombang, 2010

Selanjutnya berdasarkan angka perhitungan PDRB Kabupaten Jombang tahun 2009, terlihat bahwa kontribusi sektor tertinggi PDRB Kabupaten Jombang tahun 2009 adalah dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 33,79%; disusul kemudian sektor pertanian sebesar 30,54%, sektor industri pengolahan sebesar 11,39%, sektor jasa-jasa sebesar 12,16%, sektor keuangan, perbankan dan jasa perusahaan sebesar 4,04%, sektor angkutan dan komunikasi sebesar 4,10%, sektor bangunan sebesar 1,98%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,57%, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 1,12%.

Untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat dapat di gunakan pendekatan dari indikator PDRB per kapita. PDRB Per kapita adalah indikator makro yang secara agregat di hitung dari

PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Selain itu, hal ini penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi. PDRB per kapita ini pada umumnya selain dipengaruhi oleh faktor produksi juga sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa. Dengan demikian maka pengaruh inflasi menjadi cukup dominan dalam pembentukan pendapatan regional. Adapun perkembangan pendapatan per kapita baik atas dasar harga berlaku adalah sebagaimana yang telah dipaparkan dalam table 4.1 diatas.

Dari grafik di atas, nampak bahwa selama empat tahun terakhir ini, PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2006, PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 7.388.820,- dan kemudian meningkat menjadi Rp. 9.377.8400,- pada tahun 2008 dan menjadi Rp. 10.233.990,- pada tahun 2009, atau meningkat sebesar 9,1% dibandingkan tahun 2008.

Selanjutnya indikator kesejahteraan berupa PDRB per kapita ini harus diselaraskan dengan indikator angka kemiskinan. Hal ini cukup penting mengingat angka kemiskinan dapat memberikan gambaran mengenai intensitas penduduk dengan tingkat pendapatan terendah di tingkat perekonomian wilayah Kabupaten. Dalam rentang waktu 4 tahun terakhir (2006-2009) berdasarkan data BAPPEDA Kabupaten Jombang tahun 2009 angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Jombang menunjukkan angka yang cenderung tinggi (didas 20% jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Jombang), sebagaimana nampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5. Prosentase Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2006-2009

Tahun	Prosentase Jumlah Masyarakat Miskin (%)
2005	26,80
2006	26,59
2007	22,14
2008	22,05

Sumber : BAPPEDA Kab. Jombang, 2010

Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Jombang masih relatif tinggi, walaupun PDRB perkapita (ADHB) juga menunjukkan angka yang semakin meningkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terjadi kesenjangan pendapatan di masyarakat atau di tingkat wilayah kecamatan di Kabupaten Jombang. Untuk itu perlu segera dilaksanakan langkah-langkah yang strategis dan komprehensif serta lebih terintegrasi, terkait dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan serta pemerataan pembangunan wilayah.

Sedangkan Apabila dilihat dari perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jombang, terlihat terjadi peningkatan jumlah besaran APBD selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Jombang untuk membiayai berbagai program pembangunan dalam kurun waktu tersebut juga meningkat. Perkembangan APBD Kabupaten Jombang secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6. APBD Kabupaten Jombang Tahun 2007-2009

Tahun	Besaran APBD (Rp.)		
	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Jumlah
2007	339.037.890.133	418.195.435.685	757.233.325.818
2008	365.417.607.851	559.629.392.961	925.047.000.812
2009	362.160.653.975	608.511.719.925	970.672.373.900

Sumber : BAPPEDA Kab. Jombang, 2010.

4.3. Kondisi Sektor Pendidikan

Kondisi sektor pendidikan di kabupaten jombang pada tahun 2009 dapat dibaca diantaranya berdasarkan Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah ini menunjukkan sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bidang pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk mengukur kinerja pelayanan ini dapat diukur dari dua indikator yaitu rasio jumlah guru terhadap murid dan rasio jumlah sekolah terhadap murid.

Berdasarkan rasio jumlah guru terhadap murid dalam kurun waktu 2005–2009 jumlah murid SD/MI di Kabupaten Jombang mengalami penurunan sebanyak 3.783 siswa yaitu dari sebanyak 128.492 siswa pada tahun 2005 menjadi sebanyak 124.709 siswa pada tahun 2009 atau turun sebesar 2,94%, sementara jumlah guru mengalami peningkatan sebanyak 1.008 orang yaitu dari sebanyak 7.933 orang pada tahun 2005 menjadi sebanyak 8.941 orang pada tahun 2009 atau naik sebesar 12,71%. Penurunan jumlah siswa yang diiringi dengan peningkatan jumlah guru ini menyebabkan perubahan rasio jumlah guru terhadap murid.

Rasio jumlah guru terhadap murid pada tingkat SD/MI di Kabupaten Jombang telah mengalami peningkatan yang cukup berarti, yaitu dari rasio 1:16 pada tahun 2005 menjadi 1: 14 pada

tahun 2009. Rasio jumlah guru terhadap murid pada tingkat SMP/MTs di Kabupaten Jombang telah mengalami peningkatan yaitu, dari rasio 1:12 pada tahun 2005 menjadi 1:11 pada tahun 2009. Sedangkan pada tingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Jombang sepanjang tahun tersebut tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 1:10.

Berdasarkan rasio-rasio tersebut dapat dikatakan bahwa ketersediaan guru dibandingkan dengan jumlah murid yang ada untuk seluruh jenjang pendidikan telah mencukupi. Ke depan upaya yang perlu dilakukan adalah penataan guru dalam rangka pemerataan penyebaran serta peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru.

Sedangkan berdasarkan rasio jumlah sekolah terhadap murid Jumlah anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Jombang pada tahun 2005-2009 mengalami penurunan sebanyak 14.215 anak, yaitu dari sebanyak 125.328 anak pada tahun 2005 menjadi sebanyak 111.113 anak pada tahun 2009 atau turun sebesar 11,34%, sementara jumlah sekolah SD/MI di Kabupaten Jombang pada kurun waktu tersebut mengalami penurunan sebanyak 31 unit, yaitu dari sebanyak 854 unit pada tahun 2005 menjadi sebanyak 823 unit pada tahun 2009 atau turun sebesar 3,63%. Dari kondisi tersebut maka rasio sekolah dengan jumlah anak usia SD/MI adalah sebesar 1: 147 pada tahun 2005 dan sebesar 1:135 pada tahun 2009.

Selanjutnya jumlah anak usia 13-15 tahun di Kabupaten Jombang pada tahun 2005-2009 mengalami penurunan sebanyak 16.195 anak, yaitu dari sebanyak 66.735 anak pada tahun 2005 menjadi sebanyak 50.540 anak pada tahun 2009 atau turun sebesar 24,27%, sementara jumlah sekolah SMP/MTs di Kabupaten

Jombang pada kurun waktu tersebut mengalami penurunan sebanyak 16 unit, yaitu dari sebanyak 249 unit pada tahun 2005 menjadi sebanyak 233 unit pada tahun 2009 atau turun sebesar 6,43%. Dari kondisi tersebut maka rasio sekolah dengan jumlah murid SMP/MTs adalah sebesar 1:268 pada tahun 2005 dan sebesar 1:217 pada tahun 2009.

Pada tingkat SMA/MA/SMK, pada kurun waktu 2005-2009, jumlah sekolah mengalami peningkatan sebanyak 6 unit, yaitu dari sebanyak 167 unit pada tahun 2005 menjadi sebanyak 173 unit pada tahun 2009. Sedangkan rasio sekolah dengan jumlah murid SMA/MA/SMK adalah sebesar 1: 425 pada tahun 2005 dan sebesar 1:228 pada tahun 2009.

Secara ringkas data rasio guru-murid dan sekolah-murid di Kabupaten Jombang pada tahun 2009 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.7. Rasio Guru-Murid Dan Sekolah-Murid Di Kabupaten Jombang Tahun 2009

Variabel	Sub Variabel	Jumlah	Rasio
Guru	SD/MI	8.941	1: 14
	SMP/MTs	5.714	1:11
	SMA/MA/SMK	5.271	1:10
Sekolah	SD/MI	823	1:135
	SMP/MTs	233	1:217
	SMA/MA/SMK	173	1:228

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Jombang tahun 2010

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 menunjukkan perkembangan yang relatif stabil. Hal ini dapat dilihat dari trend Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sementara (APS) dari semua tingkatan, mulai dari SD/MI sampai

dengan tingkat SLTA/ sederajat . hal ini menindikasikan terjaganya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar.

APM merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12; 13-15 dan 16-18 tahun yang bersekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dibagi seluruh jumlah anak usia 7-12; 13-15 dan 16-18 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut. Realisasi APM yang dicapai pada tahun 2009 untuk SD/MI sebesar 92,39%, SMP/MTs sebesar 78,51% dan SMA/MA/SMK sebesar 67,82%.

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah seluruh murid sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut. Realisasi APK yang dicapai pada tahun 2009 untuk SD/MI sebesar 103,70%, SMP/MTs sebesar 101,83% dan SMA/MA/SMK sebesar 91,82%.

Perkembangan Angka partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2008 - 2009 pada masing-masing jenjang pendidikan dapat digambarkan dalam dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.8. Perkembangan APM dan APK di Kabupaten Jombang Tahun 2008-2009

Jenjang Pendidikan	APM		APK	
	2008	2009	2008	2009
SD/MI	92,00	92,39	104,21	103,70
SMP/MTs	83,97	78,51	101,58	101,83
SMA/MA/SMK	63,68	67,82	86,59	91,82

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Jombang tahun 2010

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa APM untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMA/MA/SMK tahun 2009 cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini terutama diduga disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

pendidikan. Sedangkan APK tahun 2009 pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan sebesar 0,51%, SMP/MTs meningkat sebesar 0,25% dan APK untuk SMA/MA/SMK meningkat sebesar 5,23%. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya jumlah siswa dari luar Kabupaten Jombang bersekolah di Jombang.

Sementara itu bisa ditinjau dari angka putus sekolah yang dihitung berdasarkan angka (jumlah siswa) putus sekolah per 1.000 siswa pada setiap jenjang pendidikan. Angka putus sekolah yang pada tahun 2009 untuk SD/MI sebesar 0,09%, SMP/MTs sebesar 0,40%, serta SMA/MA/SMK sebesar 0,87%.

4.4. Kondisi Sektor Kesehatan

Perkembangan kondisi sektor kesehatan di Kabupaten Jombang dapat diukur dari perkembangan derajat kesehatan, yaitu angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan. Angka kematian bayi menunjukkan trend penurunan dari angka 12,87 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 10,4 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2009 atau turun sebesar 23,75%.

Sementara angka kematian ibu maternal sepanjang tahun 2006 - 2009 menunjukkan trend fluktuatif, dengan angka kematian tertinggi terjadi pada tahun 2007 yakni sebesar 89 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu maternal menurun secara signifikan pada tahun 2009 yakni hanya sebesar 69 per 100.000 kelahiran hidup. Namun demikian meskipun terjadi fluktuasi, capaian angka kematian ini lebih baik dari target nasional yang harus dicapai sebagaimana target indikator Indonesia Sehat 2010. Berikut ini adalah perkembangan angka kematian bayi dan angka kematian ibu maternal di Kabupaten Jombang tahun 2006 - 2009.

Tabel. 4.9. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) Maternal di Kabupaten Jombang Tahun 2006 - 2009

Tahun	AKB (per 1000 kelahiran hidup)	AKI (per 100.000 kelahiran hidup)
2006	10,00	77,00
2007	12,87	89,00
2008	11,43	80,92
2009	10,40	69,00

Sumber; Dinas Kesehatan Kab. Jombang 2010

Sedangkan apabila dilihat ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Jombang pada tahun 2009 diketahui bahwa di Kabupaten Jombang telah berdiri 10 rumah sakit dan 34 puskesmas ditambah 73 puskesmas pembantu. Juga terdapat sejumlah 1.515 posyandu dan 188 polindes yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk selengkapnya jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Jombang tahun 2009 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.10. Sarana Kesehatan di Kabupaten Jombang Tahun 2009

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah sakit	10
2	Puskesmas	34
	a. puskesmas perawatan	17
	b. puskesmas non perawatan	17
3	Puskesmas pembantu	73
4	Posyandu	1.515
5	Polindes	188
6	Rumah bersalin	14
7	Balai pengobatan klinik	49

Sumber; Dinas Kesehatan Kab. Jombang 2010

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2009 sebanyak 1.816 orang yang terdiri dari dokter umum sebanyak 138 orang, dokter gigi sebanyak 42 orang, dokter spesialis 81 orang, perawat sebanyak 782 orang, bidan sebanyak 490 orang, tenaga farmasi sebanyak 90 orang, tenaga kesehatanan

masyarakat sebanyak 32 orang, sanitasian sebanyak 43 orang, ahli gizi sebanyak 42 orang, keterampilan fisik sebanyak 15 orang, dan teknisi medis sebanyak 61 orang. Dari jumlah tersebut jika dibandingkan dengan jumlah penduduk maka rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 4.11. Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap 100.000 Penduduk Tahun 2009

Tenaga Kesehatan	Jumlah	Rasio	Standar Indikator Indonesia Sehat 2010
Dokter umum	138	11,11	40
Dokter spesialis	81	6,52	6
Dokter gigi	42	3,38	11
Perawat	782	62,96	117
Bidan	490	39,45	100
Farmasi	90	7,25	30
Kesmas	32	2,58	40
Sanitasi	43	3,46	40
Gizi	42	3,38	22
Keterampilan fisik	15	1,21	4
Teknisi medis	61	4,91	15

Sumber; Dinas Kesehatan Kab. Jombang 2010

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Jombang tahun 2009 masih sangat kurang. Jumlah tenaga kesehatan yang ada dibanding jumlah penduduk masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam Indikator Indonesia Sehat 2010. Ke depan upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan tenaga kesehatan baik dari sisi jumlah maupun penyebarannya.

Untuk menilai tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten bisa dilihat dari animo masyarakat untuk berobat ke Puskesmas yang ada. Pada tahun 2009 total kunjungan rawat jalan dan rawat inap di

34 puskesmas di Kabupaten Jombang adalah 953.849 dengan rincian rawat jalan sebesar 922.175 dan rawat inap sebesar 31.674. Jumlah kunjungan ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang sebesar 864.535. Kenaikan ini menggambarkan bahwa Puskesmas masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Hal ini juga didukung semakin baik dan lengkapnya pelayanan yang diberikan oleh puskesmas bahkan beberapa di antara Puskesmas rawat inap telah memiliki fasilitas pelayanan spesialis.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (*enlarging the choices of the people*). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Di tengah eskalasi persaingan global, tuntutan terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin tinggi. Jika tidak demikian maka bangsa tersebut akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju.

Secara khusus, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

5.1. KARAKTERISTIK RESPONDEN

Berdasarkan hasil pengolahan dan perhitungan data primer yang didapatkan di lapangan, diketahui bahwa keseluruhan sampel

berjumlah 840 unit rumah tangga yang terdiri dari 3.351 individu anggota rumah tangga. Sedangkan apabila ditinjau dari sebaran jenis kelamin diketahui bahwa 51% berjenis kelamin laki-laki dan 49% sisanya berjenis kelamin perempuan.

Bila ditelusuri berdasarkan sebaran umur diketahui bahwa sebanyak 24,59% diantara anggota rumah tangga responden berumur 15 tahun kebawah dan sisanya yakni 75,41% berumur lebih dari 15 tahun. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis pekerjaan kepala rumah tangga diketahui bahwa sebagian besar responden berprofesi sebagai wiraswasta (44,49%) dan petani (32,11%), sedangkan sisanya terdapat 16,20% berprofesi sebagai pegawai negeri sipil/TNI/Polri dan 6,08% bekerja sebagai karyawan swasta. Secara rinci gambaran karakteristik responden tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1. Sebaran Sampel Penelitian

Karakteristik Sample/Responden		Jumlah
Rumah Tangga		840 unit
Jumlah Anggota RT		3.351 orang
Jenis kelamin Anggota RT	Laki-laki	51,18 %
	Perempuan	48,82 %
Umur Anggota RT	0-15 Tahun	24,59 %
	16- 39 Tahun	40,91 %
	≥ 40 Tahun	34,50 %
Pekerjaan Kepala RT	Petani	32,11%
	Wiraswasta	44,49%
	PNS/TNI/Polri	16,20%
	Karyawan Swasta	6,08%
	Lainnya	1,12%

Sumber ; data primer diolah

5.2. HASIL PERHITUNGAN IPM KABUPATEN JOMBANG

Selanjutnya berdasarkan hasil pengolahan dan perhitungan data primer yang didapatkan di lapangan, diketahui bahwa besaran

angka indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Jombang pada tahun 2010 adalah sebesar 72,86. Hasil ini meningkat sebesar 0,54 poin dari besaran IPM tahun sebelumnya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa secara umum pada tahun ini terdapat peningkatan hasil pembangunan manusia di Kabupaten Jombang.

Tingkatan status pembangunan manusia dapat dibedakan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu : tingkatan rendah ($IPM < 50$), tingkatan menengah bawah ($50 \leq IPM \leq 66$), tingkatan menengah atas ($66 < IPM < 80$) dan tingkatan tinggi ($IPM \geq 80$). Berdasarkan konsepsi diatas maka status pembangunan manusia di Kabupaten Jombang dapat dikategorikan dalam klasifikasi tingkat menengah atas.

Peningkatan besaran angka IPM tahun ini disebabkan terjadi kenaikan pada beberapa komponen indeks penyusunnya. Peningkatan besaran IPM disumbang oleh meningkatnya komponen indeks kemampuan daya beli (pendapatan) sebesar 1,66 poin yakni dari 61,59 pada tahun 2009 menjadi 63,25 pada tahun ini. Peningkatan indeks kemampuan daya beli (pendapatan) ini disebabkan karena saat ini rata-rata kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Jombang telah menyentuh angka Rp. 633.703,- (enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah) atau meningkat sebanyak Rp.7.187,- (1,15%) dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp.626,516,- (enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam belas rupiah).

Peningkatan besaran angka IPM Kabupaten Jombang pada tahun 2010 juga didorong oleh peningkatan komponen indeks tingkat pendidikan. Pada tahun ini indeks tingkat pendidikan mengalami peningkatan sebesar 0,02 point bila dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2009 indeks tingkat pendidikan Kabupaten

Jombang adalah sebesar 78,34 sedangkan pada tahun 2010 ini meningkat menjadi 78,36.

Bila dilihat lebih jauh, sebagaimana diketahui bahwa indeks tingkat pendidikan tersusun dari indeks angka melek huruf (AMH) dan indeks rata-rata lama sekolah (MYS). Tahun ini indeks AMH Kabupaten Jombang sebesar 92,89 sedangkan indeks MYS-nya berada pada level 49,31. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan data primer yang diperoleh dari survey lapangan dimana diperoleh angka melek huruf di Kabupaten Jombang tahun ini sebesar penduduk laki-laki berada pada level 95,94% dan angka melek huruf penduduk perempuan sebesar 90,11%.

Sedangkan masih belum tingginya indeks MYS disebabkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jombang baru berada pada titik 7,40 tahun dengan rincian angka rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki sebesar 8,09 tahun dan angka rata-rata lama sekolah penduduk perempuan sebesar 6,77 tahun.

Secara konseptual MYS dihitung berdasarkan penduduk usia 10+ (10 tahun ke atas), hal ini sesuai dengan kuesioner Susenas (pertanyaan untuk anggota rumah tangga berusia 10+). Namun untuk keperluan penghitungan IPM, ada konsensus dari perumus di BPS Pusat (sesuai konsep DEPKESRA sekarang Kementerian Kesra), bahwa MYS dan Angka Melek Huruf, dihitung berdasarkan penduduk berusia 15+. Hal yang sama terjadi juga jika menemui data ketenagakerjaan (hasil Sakernas), Penduduk Usia Kerja (PUK) yang ditanyakan untuk anggota rumah tangga 10+ (sesuai kuesioner Sakernas) namun untuk keperluan profil tenaga kerja (sesuai konsep DEPNAKER sekarang kementerian tenaga kerja), yang diolah adalah PUK 15+ (BPS, 2008).

Untuk selengkapnya hasil perhitungan IPM Kabupaten Jombang tahun 2010 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2. IPM Kabupaten Jombang Tahun 2010 dan 2009

Variabel	Tahun 2010*	Tahun 2009**	+ / (-)
IPM	72,86	72,32	0,54
Indeks Harapan Hidup	76,96	77,04	(0,08)
Indeks Tingkat Pendidikan	78,36	78,34	0,02
Indeks PPP	63,25	61,59	1,66
Indeks AMH	92,89	92,86	0,03
Indeks MYS	49,31	49,29	0,02

Sumber : * Data primer diolah
 ** BAPPEDA Jombang

Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa indeks harapan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2010 adalah sebesar 76,96 atau menurun sebesar 0,08 dari raihan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan terjadi penurunan angka harapan hidup pada tahun 2010 sebesar 0,05 dari 71,23 pada tahun 2009 menjadi hanya sebesar 71.18.

Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa bila mengacu pada klasifikasi pembagian status IPM menurut UNDP sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka pada tahun 2010 status raihan indeks harapan hidup dan indeks tingkat pendidikan Kabupaten Jombang tergolong dalam kategori tingkat menengah atas. Sedangkan untuk status indeks daya beli (pendapatan/PPP) masih tergolong dalam kategori tingkat menengah bawah. Sementara itu, status indeks rata-rata lama sekolah (MYS), Kabupaten Jombang masing tergolong dalam kategori tingkat rendah. Akan tetapi untuk status indeks melek huruf (AMH), Kabupaten Jombang tergolong dalam kategori tingkat atas.

Pada sisi lain, untuk mengukur kecepatan perkembangan (perubahan) pembangunan manusia (tingkat kemajuan IPM) digunakan rumus reduksi shortfall per tahun (*annual reduction shortfall*). Semakin besar reduksi shortfall (r) disuatu wilayah menunjukkan semakin besar kemampuan yang dicapai dalam periode tertentu. Kecepatan pencapaian = r , terbagi kedalam 4 (empat) tingkatan yaitu : sangat lambat ($r < 1,30$), lambat ($1,30 \leq r \leq 1,50$), menengah ($1,50 < r < 1,70$) dan cepat ($r \geq 1,70$).

Dengan mengacu pada konsepsi diatas diketahui bahwa bila menggunakan acuan besaran IPM tahun 2004, maka diketahui bahwa kecepatan perkembangan pembangunan manusia (tingkat kemajuan pencapaian IPM) Kabupaten Jombang tahun 2010 tergolong cepat. Hal ini disebabkan karena didapatkan nilai reduksi shortfall (r) sebesar 2,35.

Kesimpulan yang sama diperoleh bila didasarkan pada acuan besaran IPM tahun 2009. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus reduksi shortfall per tahun (*annual reduction shortfall*) didapatkan nilai r sebesar 1,95. Artinya bahwa kecepatan perkembangan pembangunan manusia (tingkat kemajuan pencapaian IPM) Kabupaten Jombang tahun 2010 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya termasuk dalam kategori cepat. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3. Hasil Perhitungan Reduksi Shortfall

Basis Data Tahun (t)	IPM t	IPM t+n	IPM Ideal	Reduksi Shortfall (r)	Kesimpulan
2004	68,40	72,86	100	2,35	Cepat
2009	72,32	72,86	100	1,95	Cepat

Sumber : Hasil pengolahan data IPM 2010

Kesimpulan diatas juga diperkuat oleh dari hasil perhitungan reduksi shortfall pada indeks tingkat pendidikan Kabupaten Jombang tahun 2010 bila dibandingkan data tahun 2004 dimana didapatkan nilai r sebesar 2,93. Hanya saja kecepatan perkembangan pencapaian indeks tingkat pendidikan Kabupaten Jombang tahun 2010 menjadi tergolong sangat lambat bila dibandingkan dengan data tahun 2009, dimana hanya diperoleh nilai r sebesar 0,11. ini menunjukkan bahwa pada tahun ini terjadi perlambatan laju pertumbuhan indeks tingkat pendidikan di Kabupaten Jombang.

Kondisi yang sebaliknya terlihat pada indeks PPP (kemampuan daya beli). Kecepatan perkembangan pencapaian indeks PPP Kabupaten Jombang tahun 2010 tergolong sangat lambat bila dibandingkan data tahun 2004, dimana hanya diperoleh nilai r sebesar 0,96. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan basis data tahun 2004 maka kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa kecepatan perkembangan pencapaian indeks PPP tergolong cepat. Hal ini mengingat berdasarkan hasil perhitungan diperoleh dari nilai r sebesar 4,33. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini terjadi percepatan laju pertumbuhan indeks PPP di Kabupaten Jombang.

Hasil perhitungan reduksi shortfall kurang menggembirakan terlihat pada komponen indeks harapan hidup. Walaupun nilai r untuk basis data tahun 2004 masih berada pada titik 3,67 yang artinya berdasarkan basis data tahun 2004 perkembangan laju pencapaian indeks harapan hidup di kabupaten Jombang tergolong dalam kategori cepat, pada tahun 2010 ini nilai r yang didapatkan bila dibandingkan dengan data tahun 2009 menunjukkan angka - 0,35. Ini artinya bahwa terjadi penurunan tingkat pencapaian indeks harapan hidup.

Untuk selengkapnya hasil perhitungan reduksi shortfall untuk indeks harapan hidup, indeks tingkat pendidikan dan indeks PPP Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

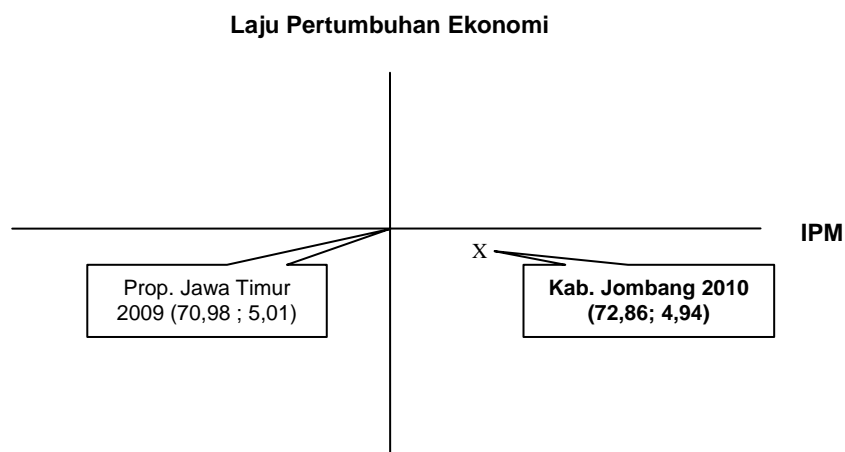
Tabel 5.4. Hasil Perhitungan Reduksi Shortfall Indeks Harapan Hidup (Eo), Indeks Tingkat Pendidikan (TP) dan Indeks PPP

Basis Data Tahun (t)	Reduksi Shortfall (r)		
	Indeks Eo	Indeks TP	Indeks PPP
2009	-0,35 (menurun)	0,11 (sangat lambat)	4,33 (cepat)
2004	3,67 (cepat)	2,93 (cepat)	0,96 (sangat lambat)

Sumber : Hasil pengolahan data IPM 2010

Sementara itu untuk mengetahui posisi relatif tingkat keberhasilan pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain berdasarkan peringkat dalam kawasan tertentu dapat diukur berdasarkan perbandingan data IPM dan pertumbuhan ekonomi satu wilayah dengan wilayah lainnya. Berdasarkan perbandingan data hasil perhitungan IPM tahun 2010 dan angka proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang tahun 2010 (yang dihitung berdasarkan rata-rata tren laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang tahun 2004-2010) dengan data IPM dan angka laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur tahun 2009, diketahui bahwa posisi relatif Kabupaten Jombang masih berada di kuadran IV.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi Kabupaten Jombang pada tahun 2010 secara relatif masih berada diatas rata-rata pencapaian daerah lain di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2009. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 5.1.
Posisi Relatif Kabupaten Jombang Terhadap Propinsi Jawa Timur

Dari seluruh uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat peningkatan hasil pembangunan manusia di Kabupaten Jombang. Bahkan kecepatan perkembangan (perubahan)-nya tergolong dalam kategori cepat. Hanya saja kedepan hendaknya fokus pembangunan diarahkan pada upaya mendorong peningkatan daya beli masyarakat serta pada pembangunan sektor pendidikan khususnya upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah. Kedepan juga penting untuk menfokuskan pembangunan di bidang kesehatan pada upaya-upaya mengembalikan pertumbuhan positif angka harapan hidup masyarakat.

Status tingkat capaian angka indeks kemampuan daya beli (pendapatan/PPP) Kabupaten Jombang tahun 2010 yang masih tergolong menengah bawah diduga dipicu oleh dampak menurunnya pendapatan masyarakat disektor pertanian akibat perubahan cuaca dan iklim yang cenderung ekstrim dan sulit diprediksi serta penyebaran hama dan penyakit. Sementara itu disisi lain harga panen fluktuatif bahkan cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan peningkatan biaya produksi khususnya

ongkos tenaga kerja dan saprodi. Penyebab lainnya adalah diduga ekses dari melambungnya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Kedua hal tersebut mengakibatkan melemahnya pertumbuhan pendapatan masyarakat. menurunnya nilai tukar serta meningkatnya anggaran pengeluaran pangan masyarakat. Walaupun secara makro, laju perekonomian di Kabupaten Jombang tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif akan tetapi tingkat pertumbuhan tersebut belum berpengaruh secara signifikan untuk mendorong peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan korelasi antara data laju pertumbuhan ekonomi dengan data perkembangan indeks kemampuan daya beli (pendapatan/PPP) dalam kurun waktu tahun 2004 sd. 2010 dimana didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,13 yang berarti bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara laju pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan indeks kemampuan daya beli (pendapatan/PPP) dalam kurun waktu tahun tersebut. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.5. Korelasi Antara Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Indeks PPP Di Kabupaten Jombang Tahun 2004-2010

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indeks PPP	Nilai Koefisien Korelasi
2004	5,40	61,00	0,13 artinya tidak terdapat korelasi yang signifikan antara kedua variabel
2005	5,49	56,63	
2006	5,60	55,44	
2007	6,09	67,70	
2008	5,97	59,49	
2009	5,02	61,59	
2010	4,94*	63,25**	

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, diolah

*Hasil proyeksi berdasarkan rata-rata tren laju pertumbuhan ekonomi Kab. Jombang 2004-2010

** Hasil perhitungan IPM Jombang 2010

Kesimpulan yang sama juga didapatkan dari hasil perhitungan korelasi antara data PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Jombang dengan data perkembangan indeks kemampuan daya beli (pendapatan/PPP) dalam kurun waktu tahun 2004 sd. 2010 dimana didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,3. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Jombang dengan data perkembangan indeks kemampuan daya beli (pendapatan/PPP) masyarakat dalam kurun waktu tahun tersebut. Untuk selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.6. Korelasi Antara PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Indeks PPP Di Kabupaten Jombang Tahun 2004-2010

Tahun	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah)	Indeks PPP	Koefisien Korelasi
2004	5.697,84	61,00	0,3 artinya tidak terdapat korelasi yang signifikan antara kedua variabel
2005	6.691,42	56,63	
2006	7.810,07	55,44	
2007	8.289,58	67,70	
2008	9.636,52	59,49	
2009	10.233,99	61,59	
2010	11.141,22*	63,25**	

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, diolah

*Hasil proyeksi berdasarkan rata-rata tren laju pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kab. Jombang 2004-2010

** Hasil perhitungan IPM Jombang 2010

Upaya mendorong daya beli masyarakat seyogyanya difokuskan pada pembangunan di sektor pertanian dan di sektor perdagangan khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini mengingat point strategis kedua sektor tersebut sebagai penyangga perekonomian melalui peranannya sebagai penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Jombang. Tingginya peranan

kedua sektor ini juga diperlihatkan oleh dominasi kontribusi kedua sektor tersebut dalam PDRB Kabupaten Jombang dalam kurun empat tahun terakhir (lihat tabel 4.4 hal 38).

Belum lagi jika dilihat lebih dalam, jamak diketahui bahwa sebagian besar masyarakat golongan miskin di Kabupaten Jombang berada (bekerja) pada kedua sektor tersebut. Ini artinya bahwa dengan melakukan intensifikasi pembangunan di sektor pertanian dan perdagangan/ UMKM maka sesungguhnya secara otomatis akan memberikan kontribusi positif pada penurunan angka kemiskinan.

Kebijakan penguatan dan intensifikasi pembangunan pertanian harus diarahkan pada upaya meningkatkan hasil produksi (panen) petani serta meningkatkan nilai tukar produk pertanian bila dibandingkan dengan produk non pertanian. Beberapa program yang penting untuk segera direalisasikan adalah:

1. Perbaiki sistem budidaya pertanian guna mendorong tingkat efisiensi biaya dan meningkatkan hasil produksi, melalui intensifikasi kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani, peningkatan mutu kompetensi dan penambahan kuantitas petugas penyuluh lapangan (PPL) serta adopsi inovasi baru dalam bidang budidaya pertanian.
2. Peningkatan upaya pengendalian hama dan penyakit khususnya pada penyakit bule yang menyerang tanaman jagung, hama tikus dan kerusakan produksi tembakau akibat curah hujan yang tinggi.
3. Pengendalian harga dan pengawasan kualitas saprodi guna menurunkan biaya produksi khususnya pada item benih/bibit, pupuk, obat-obatan pertanian dan pakan (untuk peternakan dan perikanan).

4. Penyempurnaan sistem distribusi saprodi agar lebih tepat waktu dan tepat sasaran melalui pengawasan dan pemotongan jalur tataniaga saprodi.
5. Perbaikan dan pengawasan sistem tataniga produksi pertanian guna mengeliminir anjloknya harga disaat panen diantaranya melalui pengadaan sistem informasi harga produksi yang dapat diakses hingga pelosok pedesaan, penegakan implementasi aturan yang terkait dengan harga dasar produk pertanian dan pembangunan sentra-sentra tataniaga pertanian baru.
6. Perbaikan perlakuan pasca panen atas hasil produksi pertanian sehingga dimungkinkan hasil produksi tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah akan tetapi telah diolah menjadi bahan olahan setengah jadi.

Sementara itu kebijakan yang mendorong sektor perdagangan hendaknya diarahkan pada penguatan dan pengembangan skala dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Beberapa program yang dapat dilaksanakan adalah:

1. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan revitalisasi kinerja UMKM dan koperasi.
2. Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi para remaja khususnya dari golongan masyarakat yang tidak menamatkan SMA/SMK/MA.
3. Program pemberdayaan usaha mikro untuk rumah tangga miskin.
4. Penguatan sistem promosi dan kerjasama investasi di bidang UMKM dan koperasi.

5. Pengembangan UMKM dan koperasi mandiri melalui penyediaan tenaga pendamping dan kegiatan peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan.
6. Pengembangan pasar tradisional melalui penambahan / perluasan jumlah stand maupun pembangunan pasar tradisional baru.
7. Pengembangan sentra UMKM baru yang berbasis pada potensi lokal.

Diluar semua program diatas perlu diperhatikan pula aspek penguatan permodalan melalui penyediaan fasilitas pinjaman modal dengan tingkat suku bunga yang terjangkau serta tanpa angunan misalnya melalui pemberian fasilitas modal bergulir dalam jumlah yang cukup melalui institusi swadaya sosial yang telah ada dan terpercaya di tingkat desa misalnya jam'iyah yasinan/keagamaan, rukun kematian, paguyuban ibu-ibu PKK, Posyandu dll. Hal ini guna memberikan kemudahan akses dan prosedur dalam penyerapan modal serta meminimalisir kemungkinan terjadinya "kredit macet".

Sementara itu, untuk pembangunan di bidang pendidikan, kondisi *existing* yang didapatkan cukup menggembirakan. Hal ini terlihat pada tingginya capaian indeks angka melek huruf yakni 92,89 serta tingginya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) khususnya untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Hanya saja yang perlu menjadi fokus pembangunan di bidang ini adalah upaya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah secara berkelanjutan serta peningkatan rata-rata lama sekolah bagi penduduk berusia diatas 15 tahun.

Pada tahun pelajaran 2009/2010 APM untuk tingkat SD/MI sebesar 92,39%, untuk tingkat SMP/MTs sebesar 78,51%, dan untuk tingkat SMA/MA/SMK sebesar 67,82%. Yang artinya bahwa 92,39% penduduk usia sekolah setingkat SD/MI saat ini sedang menempuh pendidikan di SD/MI, 78,51% penduduk usia sekolah setingkat SMP/MTs saat ini sedang menempuh pendidikan SMP/MTs dan 67,82% penduduk usia sekolah setingkat SMA/ sederajat saat ini sedang menempuh pendidikan SMA/MA/SMK.

Sedangkan berdasarkan data primer yang didapatkan dari survey lapangan, diketahui bahwa rata-rata lama sekolah penduduk berusia diatas 15 tahun berkisar antara 4,65 tahun sampai dengan 10,26 tahun. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi diraih oleh Kecamatan Jombang dan yang terendah terdapat di Kecamatan Kabuh. sedangkan secara umum raihan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jombang baru berada pada level 7,40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak diantara masyarakat kelompok usia dewasa yang tidak menamatkan pendidikan tertinggi setingkat SD/MI. Padahal hingga saat ini setidaknya di Kabupaten Jombang telah terdapat institusi pendidikan luar sekolah sebanyak 583 unit kegiatan keaksaraan fungsional, 3 (tiga) buah kelompok belajar/kejar paket A, 35 buah kejar paket B dan 13 buah kejar paket C yang tersebar hampir di seluruh kecamatan.

Oleh karena itu, perlu kiranya diprioritaskan pemberian penambahan alokasi anggaran pembangunan di bidang pendidikan luar sekolah di Kabupaten Jombang untuk pada peningkatan rata-rata lama sekolah utamanya melalui program kegiatan:

1. Penambahan jumlah institusi pendidikan luar sekolah (kelompok belajar /kejar paket) khususnya paket A, bahkan

bilamana perlu disetiap kecamatan terdapat minimal satu institusi.

2. Penyempurnaan sistem sosialisasi dan rekrutmen peserta didik kejar paket dengan mengoptimalkan jaringan aparatur desa/dusun serta pemberian insentif bagi peserta didik kejar paket.
3. Penyempurnaan kurikulum dan implementasi inovasi pendidikan dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) program paket
4. Perbaikan sarana prasarana pendidikan luar sekolah (kejar paket).

Untuk mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah juga perlu kiranya dilakukan melalui penyusunan peraturan daerah (perda) yang mewajibkan anak-anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan hingga jenjang SMA/MA/SMK serta yang mewajibkan masyarakat golongan dewasa yang belum menempuh atau tidak menyelesaikan pendidikan formal setingkat SMP/MTs agar mengikuti program pendidikan luar sekolah yakni kelompok belajar (kejar) paket A dan B.

Hal lain yang perlu dilakukan dalam pembangunan di bidang pendidikan adalah meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah melalui:

1. Perbaikan kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
2. Penyempurnaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan (perpustakaan, laboratorium dll.) serta
3. Penguatan muatan kurikulum berbasis potensi lokal dan adaptif dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan.

Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan IPM tahun 2010 diketahui bahwa besaran angka indeks harapan hidup Kabupaten Jombang tahun 2010 adalah 76,96. Hal ini menunjukkan bahwa status Kabupaten Jombang saat ini sudah tergolong dalam klasifikasi tingkat menengah atas. Walaupun begitu terjadi penurunan capaian indeks harapan hidup sebesar 0,08 point bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yakni sebesar 77,04.

Penurunan ini terjadi kerana pada tahun ini angka harapan hidup sejak lahir di Kabupaten Jombang berkisar antara 62,19 tahun sampai dengan 72,38 tahun dengan nilai rata-rata 71,18 tahun. Padahal disisi lain angka kematian bayi menunjukkan trend penurunan dari angka 12,87 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 10,4 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2009 atau turun sebesar 23,75%. Hal yang sama terlihat pada angka kematian ibu maternal yang juga menunjukkan tren menurun semenjak tahun 2007 dimana angka kematian ibu maternal tertinggi tahun 2007 sebesar 89 per 100.000 kelahiran hidup dan menurun secara signifikan pada tahun 2009 yakni hanya sebesar 69 per 100.000 kelahiran hidup.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan dapat dinilai telah berhasil pada aspek layanan kelahiran dan kesehatan ibu dan balita. Sehingga patut diduga bahwa penurunan indeks harapan hidup dipicu oleh menurunnya umur kematian golongan penduduk berusia diatas lima tahun (5+).

Pada tahun 2009 diketahui bahwa untuk kasus penyakit menular jenis penyakit TB paru terlihat bahwa terjadi penurunan angka kesembuhan dari 100% pada tahun 2008 menjadi 67,04% yang

salah satu faktornya disebutkan akibat waktu penemuan penderita baru disaat memasuki semester ke-2.

Pada sisi lain didapatkan data bahwa cakupan layanan kesehatan pra usia lanjut (45-59 tahun) dan lanjut usia (>60 tahun) pada tahun 2009 di Kabupaten Jombang baru menyentuh angka 62,59% dari seluruh jumlah penduduk pra usia lanjut dan penduduk usia lanjut yang dilaporkan. Adapun jumlah penduduk pra usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan baru sekitar 58,75% sedangkan untuk kelompok penduduk usia lanjut baru 65,26%.

Sementara itu berdasarkan hasil rekapitulasi data dari puskesmas, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin yang tercakup Askeskin baru sejumlah 312.220 jiwa tau sebesar 25,1% dari seluruh jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang. Dari sejumlah itu 75,18% memanfaatkan pelayanan kesehatan rawat jalan di puskesmas dan hanya 4,24% yang memanfaatkan pelayanan kesehatan rawat jalan di rumah sakit (RSU jombang dan RSK Mojowarno). Sementara itu pemanfaatan layanan kesehatan rawat inap oleh askeskin hanya sebesar 2,9% untuk puskesmas dan 2,89 untuk rumah sakit. Padahal sebagaimana diketahui bahwa masyarakat miskin termasuk dalam golongan yang rentan terhadap masalah kesehatan.

Hal lain yang memerlukan pencermatan adalah terkait dengan keberadaan rumah sehat. Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yakni memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang baik serta lantai rumah tidak terbuat dari tanah. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa baru terdapat 72,7%

bagunan tempat tinggal yang terkategori rumah sehat dari sejumlah 27,41% rumah di kabupaten Jombang yang telah diperiksa.

Data yang selaras terlihat dari hasil survey cepat perilaku hidup bersih dan sehat tahun 2009. Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa baru sekitar 33,37% dari 22.326 rumah tangga di 21 kecamatan yang menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sementara diluar itu, di Kabupaten Jombang semenjak diluncurkannya program desa siaga (desa yang penduduknya mempunyai kesiapan sumber daya untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana, kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri), baru terdapat 97 desa siaga aktif (32%) dari keseluruhan desa/kelurahan yang ada, bahkan baru 1 (satu) desa yang tergolong dalam kategori desa paripurna. Sedangkan untuk program sanitasi total berbasis masyarakat, hingga pebruari 2010 baru diinisiasi di 14 kecamatan (60 desa dan 104 komunitas) dengan jumlah komunitas ODF (*open defecatin free*) yang telah berhasil dipicu sebanyak 31%.

Dari uraian diatas maka guna mendorong peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Jombang, perlu kiranya program pembangunan dibidang kesehatan difokuskan pada upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya :

1. Penguatan promosi dan kegiatan advokasi perilaku hidup / lingkungan bersih dan sehat melalui peningkatan intensitas kegiatan penyuluhan kesehatan, pendampingan masyarakat serta pengadaan kader pelopor prilaku hidup / lingkungan bersih dan sehat.
2. Peningkatan mutu dan cakupan layanan kesehatan bagi penduduk golongan lanjut usia dan pra lanjut usia baik pada aspek layanan pengobatan maupun aspek pencegahan dan

pemeliharaan kesehatan melalui penambahan dan penguatan kelembagaan posyandu lansia, penyediaan sarana olahraga untuk masyarakat umum dan layanan kesehatan *home care*.

3. Penyediaan asuransi kesehatan bagi seluruh penduduk miskin melalui penyederhanaan sistem administrasi pendaftaran (bila mana perlu jemput bola), peningkatan intensitas sosialisasi program serta penyediaan alokasi anggaran yang memadai.
4. Penambahan jumlah dan mutu kompetensi tenaga kesehatan sebagaimana standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam Indikator Indonesia Sehat 2010 (lihat tabel 4.11 hal 47) serta pemerataan sebaran lokasi penempatannya.
5. Penguatan dan pengembangan kapasitas dan kelembagaan serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program desa siaga dan sanitasi total berbasis masyarakat.

Dengan berfokus pada prioritas dan program pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan sebagaimana diuraikan diatas diharapkan di tahun-tahun mendatang tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan manusia di Kabupaten Jombang akan dapat meningkat dengan baik.

5.2. HASIL PERHITUNGAN IPM KECAMATAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan perhitungan data primer yang didapatkan di lapangan, diketahui bahwa besaran angka indeks pembangunan manusia (IPM) kecamatan se-Kabupaten Jombang pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.7. IPM Kecamatan se-Kabupaten Jombang Tahun 2010

No	Kecamatan	IPM
1	Jombang	77.10
2	Peterongan	74.42
3	Diwek	71.73
4	Jogoroto	73.03
5	Sumobito	71.57
6	Mojoagung	71.43
7	Mojowarno	71.81
8	Bareng	69.92
9	Wonosalam	65.81
10	Ngoro	71.32
11	Gudo	75.79
12	Perak	72.81
13	Bandar Kedung Mulyo	70.96
14	Tembelang	70.47
15	Kesamben	71.91
16	Megaluh	68.41
17	Ploso	69.66
18	Kabuh	65.18
19	Kudu	70.03
20	Ngusikan	68.55
21	Plandaan	70.90

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa besaran IPM tertinggi diraih oleh Kecamatan Jombang yaitu sebesar 77,10. Sedangkan besaran IPM terendah terdapat pada Kecamatan Kabuh dengan raihan sebesar 65,18.

Sedangkan apabila dilihat laju pertumbuhan capaian IPM-nya berdasarkan hasil perhitungan reduksi shortfall IPM Kecamatan tahun 2010 bila dibandingkan dengan basis data tahun 2009 diketahui bahwa terdapat 57,14% kecamatan yang laju pertumbuhan capaian IPM-nya termasuk klasifikasi cepat. Hal ini menegaskan bahwa secara umum laju pertumbuhan pencapaian IPM di

Kabupaten Jombang dapat dikategorikan cepat. Kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan capaian IPM-nya dalam kategori cepat berjumlah 12 buah yaitu Diwek, Jogoroto, Sumobito, Mojowarno, Bareng, Ngoro, Gudo, Tembelang, Kesamben, Megaluh, Ngusikan dan Plandaan.

Diluar itu berdasarkan perhitungan reduksi shortfall dengan basis data tahun 2009, terdapat 3 kecamatan yakni Jombang, Bandar kedungmulyo dan Kabuh yang status laju pertumbuhan capaian IPM-nya tergolong menengah serta 2 kecamatan (Ploso dan Peterongan) dengan laju pertumbuhan capaian IPM-nya berstatus sangat lambat. Bahkan terdapat 2 kecamatan yang capaian IPM-nya berstatus menurun yaitu Mojoagung dan Perak. Penyebab sangat lambatnya laju pertumbuhan capaian IPM di Ploso dan Peterongan disebabkan menurunnya capaian indeks harapan hidup (IHH) serta rendahnya laju indeks kemampuan daya beli (PPP). Sedangkan penyebab menurunnya IPM di Mojoagung dan Perak adalah menurunnya raihan mereka pada komponen IHH dan indeks PPP.

Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa mayoritas status raihan IPM kecamatan di Kabupaten Jombang adalah tingkat menengah atas, yakni diraih oleh sejumlah 19 kecamatan (90,48%). Diluar itu masih terdapat 2 kecamatan yang status raihan IPM-nya tergolong menengah bawah yakni Kecamatan Kabuh (65,18) dan Kecamatan Wonosalam (65,81).

Selanjutnya dari hasil perhitungan juga diketahui bahwa posisi relatif tingkat keberhasilan program pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi antara capaian suatu kecamatan dengan capaian rata-rata kabupaten berdasarkan peringkat dalam kawasan wilayah Kabupaten Jombang digunakan ukuran berdasarkan perbandingan data capaian IPM tahun 2010 dan PDRB ADHB tahun

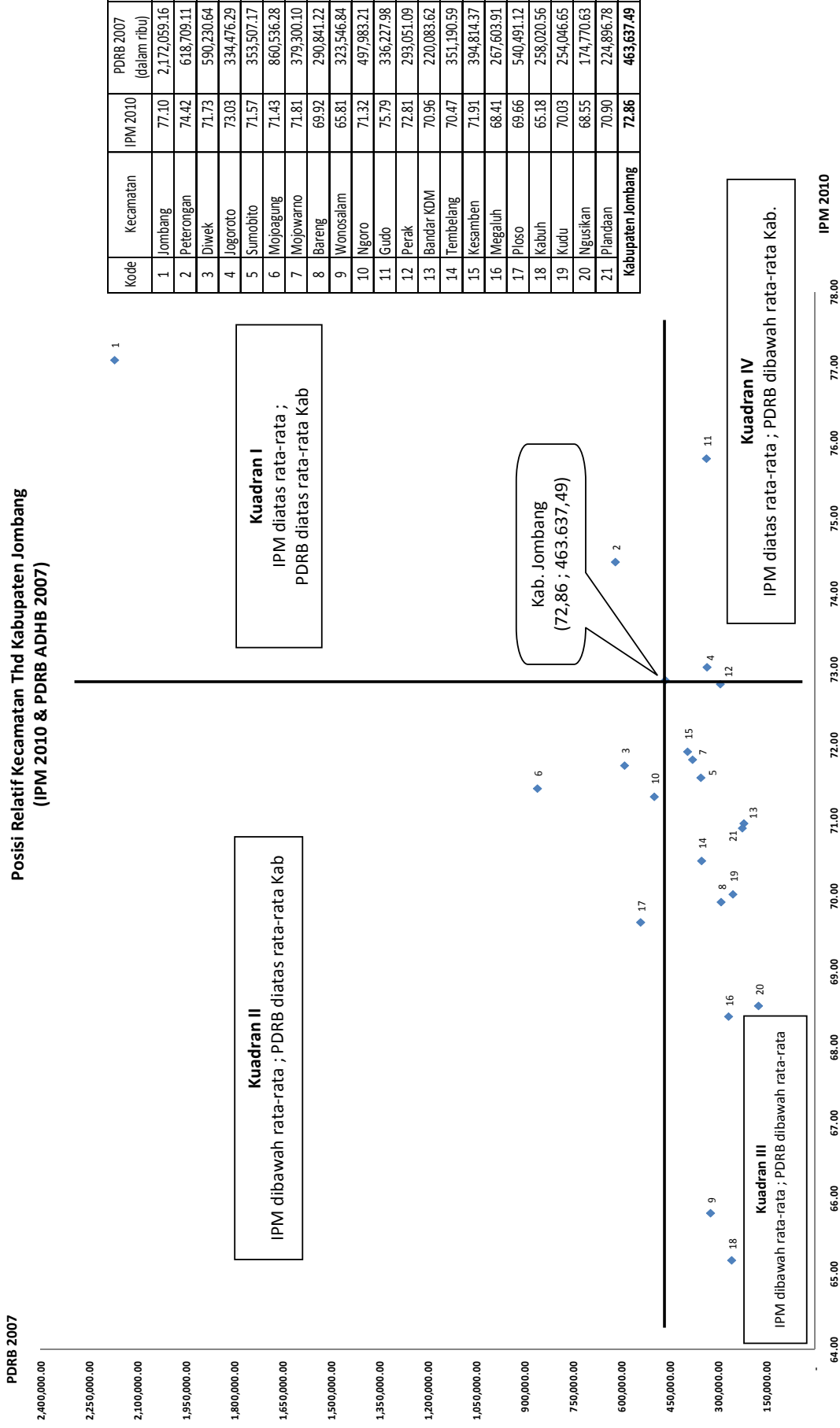
2007. Hal ini dilakukan mengingat ketersediaan data hasil perhitungan PDRB kecamatan yang paling mutakhir adalah pada tahun 2007.

Berdasarkan perbandingan tersebut, diketahui bahwa terdapat 2 (dua) kecamatan yang mempunyai posisi relatif di kuadran I yakni Kecamatan Jombang dan Peterongan. Kedua kecamatan ini capaian IPM 2010 dan PDRB-nya diatas raihan rata-rata kabupaten. Juga diketahui bahwa terdapat 2 (dua) kecamatan yang berada di kuadran IV yaitu Kecamatan Gudo dan Jogoroto yang artinya capaian IPM 2010 kedua kecamatan tersebut diatas kabupaten akan tetapi PDRB-nya dibawah rata-rata kabupaten.

Selanjutnya terdapat 4 (empat) kecamatan yang berada di kuadran II (capaian IPM 2010 dibawah kabupaten akan tetapi PDRB 2007 diatas rata-rata kabupaten) yakni Kecamatan Diwek, Ngoro, Mojoagung dan Ploso. Sementara sisanya yakni 13 Kecamatan berada di kuadran III (capaian IPM 2010 dan PDRB-nya dibawah rata-rata kabupaten). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 5.2

Posisi Relatif Kecamatan Thd Kabupaten Jombang
(IPM 2010 & PDRB ADHB 2007)



Berdasarkan uraian tentang status capaian IPM dan posisi relatif tingkat keberhasilan program pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi kecamatan diatas dapat disimpulkan bahwa masih terlihat indikasi adanya disparitas tingkat capaian hasil pembangunan manusia dan hasil pembangunan ekonomi diantara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Jombang khususnya untuk Kecamatan Kabuh dan Wonosalam.

Sedangkan apabila ditilik dari komponen indeks penyusunnya maka diketahui bahwa IPM tersusun dari indeks harapan hidup (Eo), Indeks Tingkat Pendidikan dan Indeks Kemampuan Daya Beli/Pendapatan (PPP). Besaran angka indeks harapan hidup kecamatan se-Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5.8. Indeks Harapan Hidup Kecamatan
se-Kabupaten Jombang Tahun 2010**

No	Kecamatan	Indeks Harapan Hidup (Eo)
1	Jombang	78.97
2	Peterongan	77.90
3	Diwek	71.03
4	Jogoroto	76.47
5	Sumobito	71.45
6	Mojoagung	77.18
7	Mojowarno	73.39
8	Bareng	68.46
9	Wonosalam	61.98
10	Ngoro	75.76
11	Gudo	78.80
12	Perak	71.68
13	Bandar Kedung Mulyo	75.78
14	Tembelang	69.90
15	Kesamben	75.17
16	Megaluh	67.83
17	Ploso	73.98
18	Kabuh	67.11
19	Kudu	74.34
20	Ngusikan	70.12
21	Plandaan	75.71

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa besaran indeks harapan hidup tertinggi diraih oleh Kecamatan Jombang yaitu sebesar 78,97. Sedangkan besaran indeks harapan hidup terendah terdapat pada Kecamatan Wonosalam dengan raihan sebesar 61,98.

Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa terdapat 20 kecamatan yang status raihan indeks harapan hidup-nya tergolong dalam klasifikasi tingkat menengah atas serta masih terdapat 1 kecamatan yang status raihan indeks harapan hidup-nya masih tergolong tingkat menengah bawah yakni Kecamatan Wonosalam. Saat ini angka harapan hidup di Kecamatan kabuh baru berada pada

titik 65,27 tahun jauh dibawah raihan Kecamatan Jombang yang berada di angka 72,38 tahun.

Sedangkan apabila ditilik dari indeks tingkat pendidikan kecamatan se-Kabupaten Jombang, diketahui bahwa indeks tingkat pendidikan tertinggi diraih oleh Kecamatan Jombang dengan besaran 87,82. Sedangkan indeks tingkat pendidikan terendah diraih oleh Kecamatan Kabuh dengan raihan sebesar 64,82.

Berdasarkan hasil perhitungan indeks tingkat pendidikan juga diketahui bahwa terdapat 6 kecamatan yang meraih status indeks tingkat pendidikan dengan klasifikasi tingkat atas atau bertambah satu kecamatan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Jombang, Peterongan, Diwek, Jogoroto, Gudo dan Perak. Selain itu terdapat 15 kecamatan (71,43%) yang status raihan indeks tingkat pendidikan-nya tergolong dalam klasifikasi tingkat menengah atas serta masih terdapat 1 kecamatan yang status raihan indeks tingkat pendidikan-nya masih tergolong tingkat menengah bawah yakni Kecamatan Kabuh.

Selengkapnya hasil perhitungan indeks tingkat pendidikan kecamatan se-Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.9. Indeks Tingkat Pendidikan Kecamatan
se-Kabupaten Jombang Tahun 2010**

No	Kecamatan	Indeks Tingkat Pendidikan	Indeks Angka Melek Huruf (AMH)	Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)
1	Jombang	87.82	97.52	68.43
2	Peterongan	82.59	96.92	53.93
3	Diwek	80.00	94.33	51.35
4	Jogoroto	80.95	95.59	51.68
5	Sumobito	79.22	94.92	47.81
6	Mojoagung	74.73	87.69	48.80
7	Mojowarno	78.49	93.08	49.32
8	Bareng	77.65	94.53	43.88
9	Wonosalam	70.90	88.12	36.47
10	Ngoro	74.79	90.97	42.42
11	Gudo	84.90	97.87	58.97
12	Perak	84.05	96.99	58.17
13	Bandar Kedung Mulyo	72.94	86.89	45.05
14	Tembelang	76.56	93.26	43.17
15	Kesamben	77.36	94.99	42.10
16	Megaluh	72.91	85.52	47.67
17	Ploso	72.41	86.25	44.74
18	Kabuh	64.82	81.73	30.98
19	Kudu	72.02	89.51	37.05
20	Ngusikan	71.00	84.47	44.06
21	Plandaan	73.22	89.77	40.11

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan data pada tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa besaran indeks angka melek huruf (AMH) tahun 2010 yang tertinggi diraih oleh Kecamatan Gudo yaitu sebesar 97,87. Sedangkan besaran indeks AMH terendah terdapat di Kecamatan Kabuh dengan raihan sebesar 81,73.

Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa seluruh kecamatan (100%) di Kabupaten Jombang status raihan indeks angka melek huruf (AMH)-nya tergolong dalam klasifikasi tingkat atas yakni pada kisaran angka 81,73 sd. 97,87. Capaian indeks AMH ini

juga meningkat dari capaian tahun sebelumnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,03 dimana peningkatan tertinggi terdapat di Kecamatan Mojoagung dan Kudu . Raihan ini adalah sebuah prestasi yang patut dipertahankan utamanya demi perbaikan mutu dan hasil pembangunan pendidikan di tahun mendatang.

Berdasarkan data tabel hasil perhitungan indeks rata-rata lama sekolah (MYS) diatas juga diketahui bahwa besaran indeks MYS kecamatan tahun 2010 yang tertinggi diraih oleh Kecamatan Jombang yakni sebesar 68,43. Sedangkan besaran indeks MYS terendah terdapat di Kecamatan Kabuh dengan raihan sebesar 30,98. Saat ini rata-rata lama sekolah penduduk berusia lebih dari 15 tahun di Kecamatan kabuh baru berada pada titik 4,65 tahun berjarak cukup lebar dengan raihan Kecamatan Jombang yang berada di angka 10,26 tahun.

Berpijak pada tabel 5.7 diatas, juga terlihat bahwa mayoritas status indeks MYS kecamatan se-Kabupaten Jombang masih tergolong tingkat rendah. Terdapat 15 kecamatan (71,43%) yang status indeks MYS nya tergolong dalam klasifikasi tingkat rendah serta terdapat 5 kecamatan yang berstatus tingkat menengah bawah. Hanya 1 kecamatan yakni Kecamatan Jombang yang status indeks MYS-nya tergolong dalam klasifikasi tingkat menengah atas. Ini berarti bahwa secara umum status raihan indeks MYS kecamatan di Kabupaten Jombang masih tergolong tingkat rendah.

Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan IPM kecamatan se-Kabupaten Jombang didapatkan bahwa besaran indeks kemampuan daya beli (pendapatan/PPP) kecamatan tahun 2010 yang tertinggi diraih oleh Kecamatan Tembelang yaitu dengan capaian sebesar 64,95. Sedangkan besaran indeks PPP yang terendah terdapat di Kecamatan Jogoroto yakni sebesar 61,67. Pertumbuhan indeks PPP

yang cukup tinggi terlihat pada Kecamatan Ngusikan (naik sebesar 3,85 point dari tahun sebelumnya), Megaluh (naik 3,58 point), Sumobito (naik 3,41 point) dan Plandaanan (naik 2,78 point).

Sedangkan apabila dianalisa berdasarkan status capaian indeks PPP kecamatan se-Kabupaten Jombang pada tahun 2009 diketahui bahwa status capaian indeks PPP seluruh kecamatan (100%) di Kabupaten Jombang masih tergolong dalam klasifikasi menengah bawah dengan rentang kemampuan daya beli berkisar antara Rp.626.825,- sd. Rp.641.043,-. Akan tetapi berdasarkan hasil perhitungan reduksi shortfall indeks PPP tahun 2010 berdasarkan basis data tahun 2009 diketahui bahwa terdapat 80,95% kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan capaian indeks PPP yang tergolong dalam kategori cepat.

Keberhasilan Kecamatan Tembelang mengungguli Kecamatan Jombang dalam hal capaian indeks PPP tahun 2010 dikarenakan pada tahun ini kemampuan daya beli penduduk Kecamatan Tembelang naik sebesar Rp.8.688,- lebih tinggi dari kenaikan kemampuan daya beli penduduk Kecamatan Jombang yang hanya naik sebesar Rp. 5.006,- pada tahun 2010 ini. Sementara itu secara rata-rata kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Jombang tumbuh sebesar Rp.7.187,-.

Laju pertumbuhan yang sangat menonjol terlihat pada pada Kecamatan Ngusikan dimana terjadi kenaikan kemampuan daya beli masyarakat sebesar Rp.16.674,- dari tahun 2009. Megaluh (naik Rp. 15.492,-), Sumobito (naik Rp.14.755,-) dan Plandaan (naik Rp.12.027,-). Sementara itu terdapat 2 kecamatan yang mengalami penurunan kemampuan daya beli yakni Kecamatan Mojoagung dimana terjadi penurunan sebesar Rp.2.875,- dan Kecamatan Perak yang turun sebesar Rp.1.601,- dari tahun sebelumnya.

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.10. Indeks Kemampuan Daya Beli (PPP) Kecamatan se-Kabupaten Jombang Tahun 2010

No	Kecamatan	Indeks Kemampuan Daya Beli (PPP)	Kemampuan Daya Beli (Rp.)
1	Jombang	64.49	639.081
2	Peterongan	62.78	631.655
3	Diwek	64.16	637.616
4	Jogoroto	61.67	626.875
5	Sumobito	64.04	637.123
6	Mojoagung	62.38	629.922
7	Mojowarno	63.55	634.981
8	Bareng	63.66	635.473
9	Wonosalam	64.54	639.268
10	Ngoro	63.41	634.367
11	Gudo	63.67	635.515
12	Perak	62.69	631.287
13	Bandar Kedung Mulyo	64.17	637.662
14	Tembelang	64.95	641.043
15	Kesamben	63.21	633.526
16	Megaluh	64.49	639.050
17	Ploso	62.57	630.768
18	Kabuh	63.62	635.307
19	Kudu	63.71	635.706
20	Ngusikan	64.53	639.240
21	Plandaan	63.77	635.954

Sumber : data primer diolah

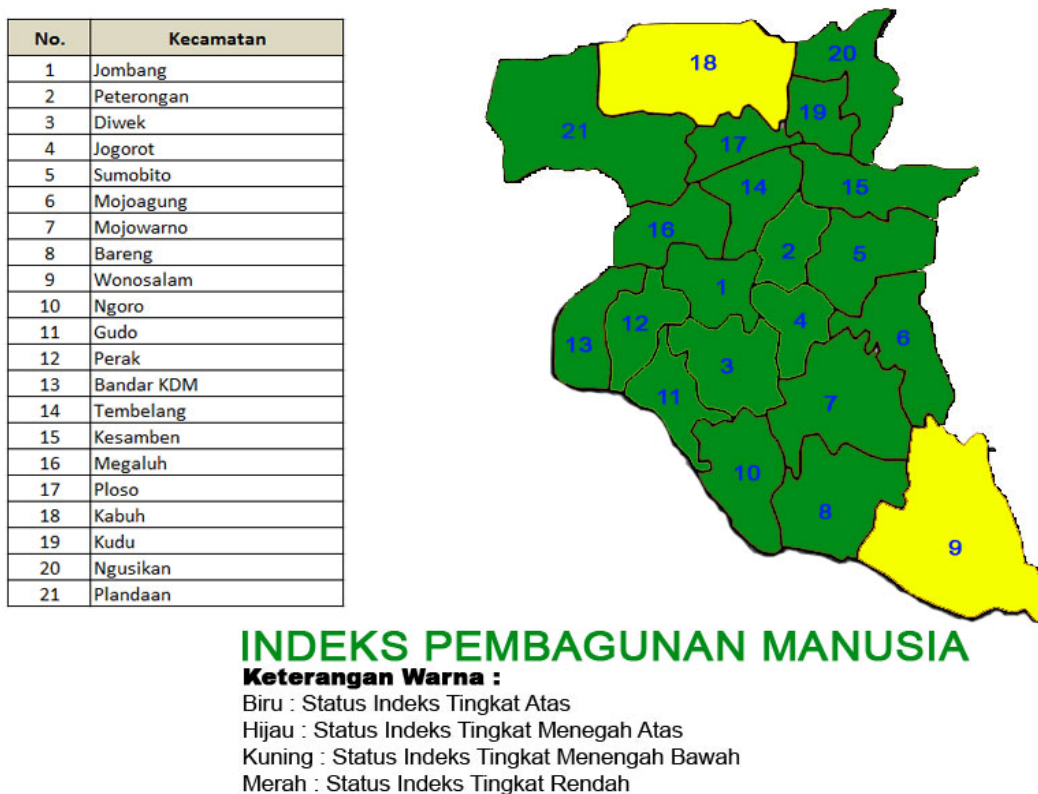
5.3. PETA SEBARAN DAERAH TERTINGGAL

Berdasarkan hasil perhitungan IPM kecamatan se-Kabupaten Jombang tahun 2010 diketahui bahwa secara umum status raihan besaran IPM-nya tergolong tingkat menengah atas. Akan tetapi masih terdapat 2 (dua) kecamatan yang masih tertinggal bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kedua kecamatan ini status raihan besaran IPM-nya hanya berada dalam klasifikasi

tingkat menengah bawah. Kedua kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kabuh dan Wonosalam.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam peta sebaran daerah tertinggal di bidang IPM sebagai berikut.

Gambar 5.3. Peta Sebaran Daerah Tertinggal Di Bidang IPM



IPM Kecamatan Kabuh pada tahun 2010 hanya sebesar 65,18. Besaran IPM tersebut tersusun dari komponen indeks harapan hidup (67,11) indeks tingkat pendidikan (64,82) dan indeks kemampuan daya beli masyarakat (pendapatan/PPP) sebesar 63,62. Dari data tersebut terlihat bahwa rendahnya raihan IPM di Kecamatan Kabuh dipicu oleh rendahnya besaran indeks harapan hidup dan indeks pendidikan dimana pada kedua item indeks penyusun IPM tersebut

raihan Kecamatan Kabuh masih jauh berada di bawah rata-rata raihan Kabupaten Jombang.

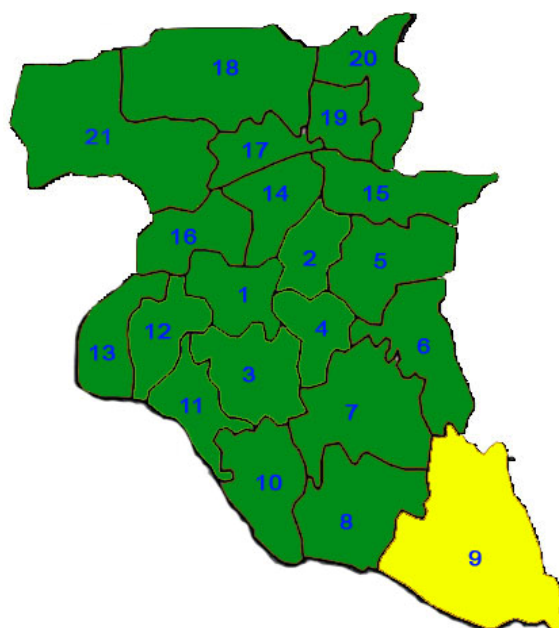
Sementara itu IPM Kecamatan Wonosalam pada tahun 2010 adalah sebesar 65,81 yang tersusun dari indeks harapan hidup sebesar 61,98 indeks tingkat pendidikan sebesar 70,90 dan indeks kemampuan daya beli masyarakat (pendapatan/PPP) sebesar 64,54. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa rendahnya raihan IPM di Kecamatan Wonosalam disebabkan oleh rendahnya capaian indeks harapan hidup serta indeks pendidikan dimana pada kedua item indeks tersebut capaian Kecamatan Wonosalam masih jauh dibawah rata-rata capaian Kabupaten Jombang.

Untuk itu program-program pembangunan manusia di Kabupaten Jombang hendaknya difokuskan pada kedua kecamatan tersebut khususnya yang terkait dengan program pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Selanjutnya akan dirinci peta sebaran daerah tertinggal dalam capaian masing-masing indeks penyusun IPM yakni indeks harapan hidup, indeks tingkat pendidikan dan indeks kemampuan daya beli (pendapatan/PPP). Untuk sebaran daerah yang tertinggal dalam capaian indeks harapan hidup dapat dilihat pada peta di bawah ini.

**Gambar 5.4. Peta Sebaran Daerah Tertinggal
Di Bidang Indeks Harapan Hidup**

No.	Kecamatan
1	Jombang
2	Peterongan
3	Diwek
4	Jogorot
5	Sumobito
6	Mojoagung
7	Mojowarno
8	Bareng
9	Wonosalam
10	Ngoro
11	Gudo
12	Perak
13	Bandar KDM
14	Tembelang
15	Kesamben
16	Megaluh
17	Ploso
18	Kabuh
19	Kudu
20	Ngusikan
21	Plandaan



INDEKS ANGKA HARAPAN HIDUP

Keterangan Warna :

Biru : Status Indeks Tingkat Atas

Hijau : Status Indeks Tingkat Menengah Atas

Kuning : Status Indeks Tingkat Menengah Bawah

Merah : Status Indeks Tingkat Rendah

Dari peta tersebut dapat dibaca bahwa secara umum status raihan indeks harapan hidup kecamatan se-Kabupaten Jombang berada pada status menengah atas kecuali untuk Kecamatan Wonosalam. Raihan indeks harapan hidup Kecamatan Wonosalam pada tahun 2010 hanya sebesar 61,98.

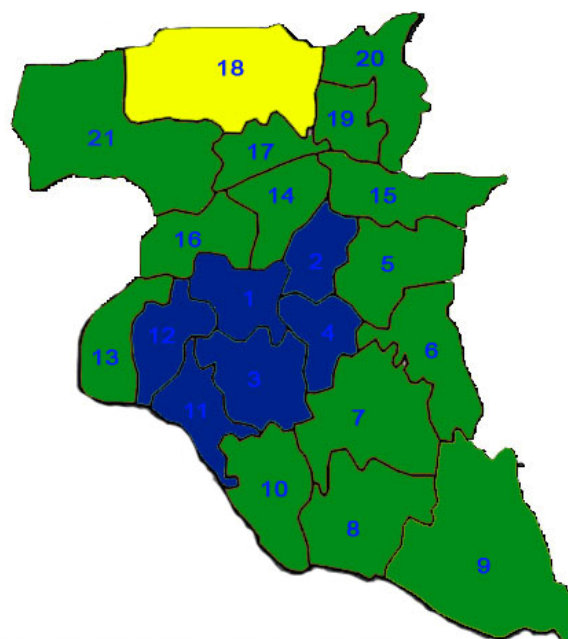
Rendahnya capaian indeks harapan hidup Kecamatan Wonosalam disebabkan oleh rendahnya angka harapan hidup sejak lahir di kecamatan Wonosalam yang rata-rata hanya berada pada angka 62,19 tahun. Untuk itu seyogyanya pada tahun mendatang program pembangunan manusia di Kabupaten Jombang untuk bidang kesehatan lebih difokuskan pada Kecamatan Wonosalam khususnya untuk mendorong peningkatan level umur kematian

penduduk pra lansia dan lansia serta penguatan aksi afirmasi dan promosi budaya hidup dan lingkungan yang bersih dan sehat.

Sedangkan untuk komponen indeks tingkat pendidikan secara umum status raihan kecamatan se Kabupaten Jombang adalah tingkat menengah atas, bahkan terdapat 6 kecamatan yang status raihnya tergolong kategori atas. Hanya saja pada komponen ini masih terdapat 1 (satu) kecamatan yang dapat digolongkan sebagai daerah yang tertinggal (kategori menengah bawah) yakni Kecamatan Kabuh dengan raihan sebesar 64,82. Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada peta dibawah ini.

Gambar 5.5. Peta Sebaran Daerah Tertinggal Di Bidang Indeks Tingkat Pendidikan

No.	Kecamatan
1	Jombang
2	Peterongan
3	Diwek
4	Jogorot
5	Sumobito
6	Mojoagung
7	Mojowarno
8	Bareng
9	Wonosalam
10	Ngoro
11	Gudo
12	Perak
13	Bandar KDM
14	Tembelang
15	Kesamben
16	Megaluh
17	Ploso
18	Kabuh
19	Kudu
20	Ngusikan
21	Plandaan



INDEKS TINGKAT PENDIDIKAN

Keterangan Warna :

Biru : Status Indeks Tingkat Atas

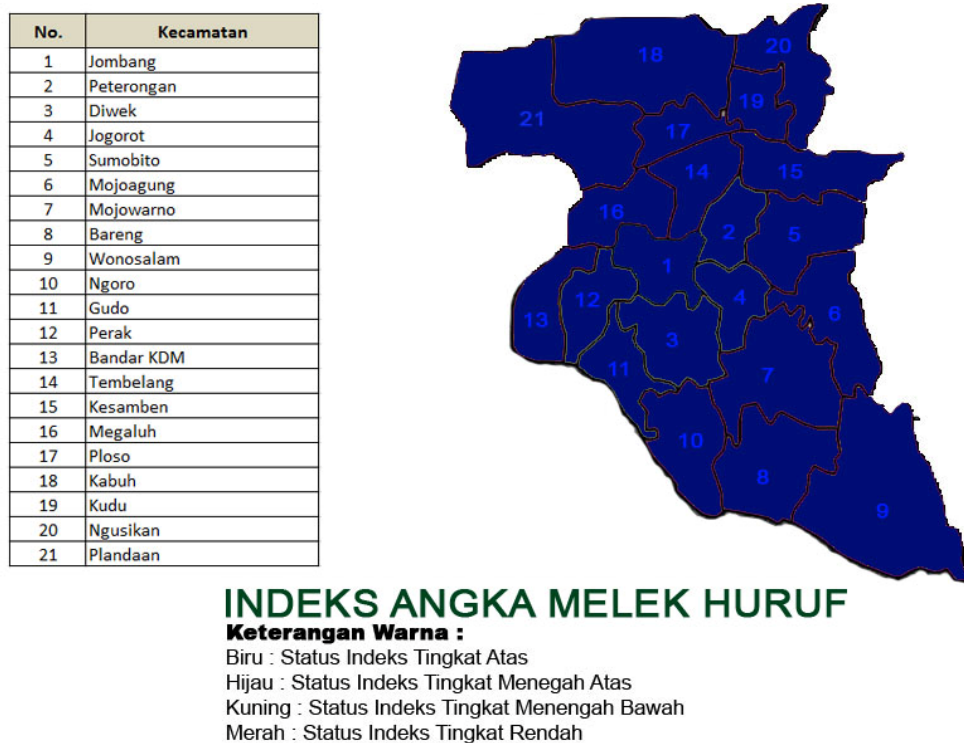
Hijau : Status Indeks Tingkat Menengah Atas

Kuning : Status Indeks Tingkat Menengah Bawah

Merah : Status Indeks Tingkat Rendah

Secara lebih rinci, sesungguhnya indeks tingkat pendidikan tersusun dari indeks angka melek huruf (AMH) dan indeks rata-rata lama sekolah (MYS) dengan proporsi 2/3 indeks AMH dan 1/3 indeks MYS. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa raihan indeks angka melek huruf (AMH) kecamatan se-Kabupaten Jombang berkisar antara angka 81,73 sd. 97,87. Dengan demikian status capaian indeks AMH di seluruh kecamatan se-Kabupaten Jombang telah berada pada kategori tingkat atas. Hal ini sebagaimana data yang diperlihatkan oleh peta berikut ini.

Gambar 5.6. Peta Sebaran Capaian Indeks AMH Kecamatan se-Kabupaten Jombang

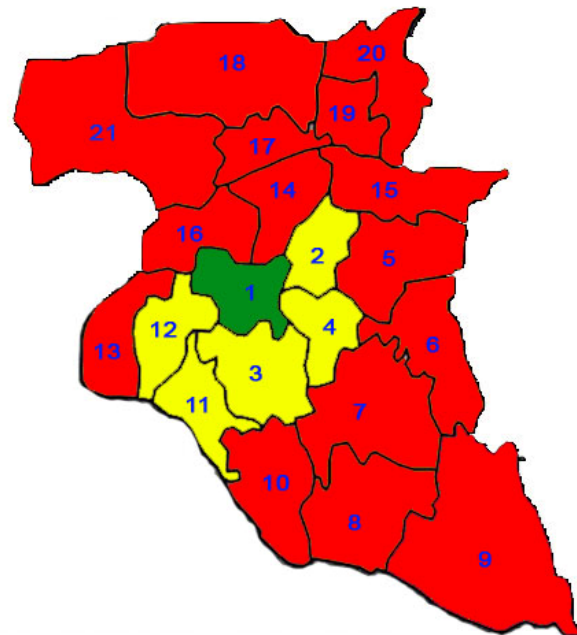


Hal sebaliknya terlihat dari hasil perhitungan indeks rata-rata lama sekolah (MYS) tahun 2010 kecamatan se-Kabupaten Jombang. Dari data tersebut diketahui bahwa raihan indeks MYS kecamatan se-Kabupaten Jombang berkisar diantara titik 30,98 sd. 68,43.

Sehingga dengan begitu secara umum dapat disimpulkan bahwa status capaian indeks MYS kecamatan se-Kabupaten Jombang masih berada pada kategori tingkat rendah. Secara detil sebaran daerah tertinggal pada indeks MYS tersaji dalam peta dibawah ini.

Gambar 5.7. Peta Sebaran Daerah Tertinggal Di Bidang Indeks MYS

No.	Kecamatan
1	Jombang
2	Peterongan
3	Diwek
4	Jogorot
5	Sumobito
6	Mojoagung
7	Mojowarno
8	Bareng
9	Wonosalam
10	Ngoro
11	Gudo
12	Perak
13	Bandar KDM
14	Tembelang
15	Kesamben
16	Megaluh
17	Ploso
18	Kabuh
19	Kudu
20	Ngusikan
21	Plandaan



INDEKS RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Keterangan Warna :

Biru : Status Indeks Tingkat Atas

Hijau : Status Indeks Tingkat Menengah Atas

Kuning : Status Indeks Tingkat Menengah Bawah

Merah : Status Indeks Tingkat Rendah

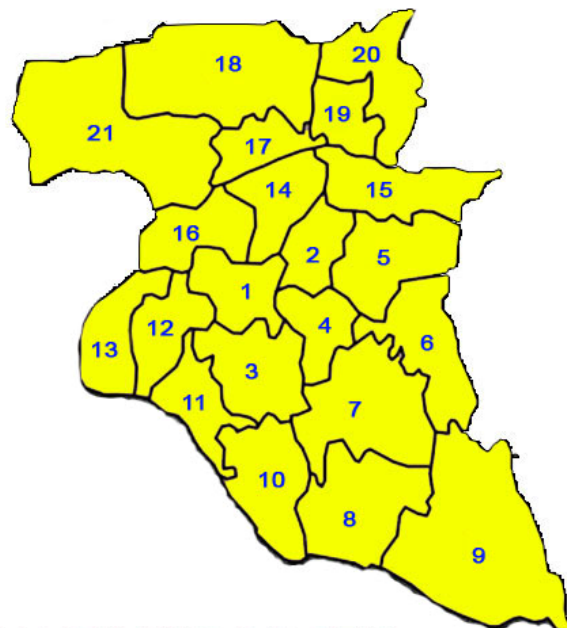
Berdasarkan peta tersebut diketahui bahwa terdapat 15 kecamatan yang masih tertinggal dalam hal pencapaian indeks MYS yakni Kecamatan Sumobito, Mojoagung, Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Ngoro, Bandar Kedungmulyo, Tembelang, Kesamben, Megaluh, Ploso, Kabuh, Kudu, Ngusikan, dan Plandaan. Dari pengolahan data primer diketahui bahwa rata-rata lama sekolah di 15 kecamatan ini baru berkisar antara 4,65 tahun sd. 7,40 tahun.

Untuk itu sepatutnya program pembangunan pendidikan khususnya yang terkait dengan upaya mendongkrak rata-rata lama sekolah diarahkan secara lebih intensif kepada penduduk berusia lebih dari lima belas tahun di 15 kecamatan tersebut.

Selanjutnya untuk komponen indeks kemampuan daya beli (pendapatan/PPP) kecamatan se-Kabupaten Jombang diketahui bahwa pada tahun 2010 ini capaian indeks PPP-nya berkisar antara 61,67 sd. 64,95. Hal ini menandakan bahwa status capaian indeks PPP seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang pada tahun 2010 berada dalam kategori menengah bawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta berikut ini.

Gambar 5.8. Peta Sebaran Capaian Indeks PPP Kecamatan se-Kabupaten Jombang

No.	Kecamatan
1	Jombang
2	Peterongan
3	Diwek
4	Jogorot
5	Sumobito
6	Mojoagung
7	Mojowarno
8	Bareng
9	Wonosalam
10	Ngoro
11	Gudo
12	Perak
13	Bandar KDM
14	Tembelang
15	Kesamben
16	Megaluh
17	Ploso
18	Kabuh
19	Kudu
20	Ngusikan
21	Plandaan



INDEKS KEMAMPUAN DAYA BELI

Keterangan Warna :

Biru : Status Indeks Tingkat Atas

Hijau : Status Indeks Tingkat Menengah Atas

Kuning : Status Indeks Tingkat Menengah Bawah

Merah : Status Indeks Tingkat Rendah

Berdasarkan gambar peta tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan daya beli masyarakat secara masif di seluruh kecamatan di wilayah Kabupten Jombang. Program pembangunan di segala bidang hendaknya di desain agar mempunyai kontribusi dalam mendorong peningkatan laju pertumbuhan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Berdasarkan data distribusi PDRB diketahui bahwa sebagian besar tenaga kerja terserap pada dua sektor raksasa yakni sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Karenanya program pembangunan ekonomi hendaknya difokuskan pada pengutan laju perkembangan sektor pertanian dan sektor perdagangan khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di seluruh wilayah kecamatan.

Ditinjau berdasarkan sebaran kontribusi per sektor pada PDRB maka seyogyanya kegiatan pembangunan ekonomi di sektor perdagangan utamanya UMKM secara terarah dapat lebih diintensifkan di Kecamatan Jombang, Peterongan, Mojoagung dan Ploso dimana pada keempat kecamatan tersebut kontribusi sektor perdagangan lebih menonjol bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN

- a. Besaran angka indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Jombang pada tahun 2010 adalah sebesar 72,86. atau meningkat sebesar 0,54 poin dari tahun sebelumnya. Artinya, bahwa secara umum pada tahun 2010 terdapat peningkatan hasil pembangunan manusia di Kabupaten Jombang.
- b. Dengan tingkat capaian IPM tersebut, maka status pembangunan manusia di Kabupaten Jombang dapat dikategorikan dalam klasifikasi tingkat menengah atas.
- c. Peningkatan besaran angka IPM Kabupaten Jombang tahun 2010 disebabkan terjadinya kenaikan pada komponen indeks kemampuan daya beli sebesar 1,66 poin (yakni dari 61,59 pada tahun 2009 menjadi 63,25 pada tahun ini) dan indeks tingkat pendidikan sebesar 0,02 point (yakni dari 78,34 pada tahun 2009 menjadi 78,36 pada tahun ini).
- d. Status capaian indeks harapan hidup dan indeks tingkat pendidikan Kabupaten Jombang tahun 2010 tergolong dalam kategori tingkat menengah atas. Sedangkan untuk status capaian indeks kemampuan daya beli (pendapatan/PPP) tergolong dalam kategori tingkat menengah bawah. Secara lebih rinci, status capaian indeks angka melek huruf (AMH) Kabupaten Jombang tahun ini tergolong dalam kategori tingkat atas, sementara status capaian indeks rata-rata lama sekolah (MYS)-nya masing tergolong dalam kategori tingkat rendah.
- e. Bila menggunakan acuan besaran IPM tahun 2004, maka didapatkan nilai reduksi shortfall (r) sebesar 2,36. sedangkan bila

- didasarkan pada acuan besaran IPM tahun 2009 didapatkan nilai r sebesar 1,96. Artinya bahwa pada tahun 2010 laju perkembangan pembangunan manusia (tingkat kemajuan pencapaian IPM) di Kabupaten Jombang tergolong cepat.
- f. Perkembangan laju pencapaian indeks harapan hidup Kabupaten Jombang tahun 2010 tergolong cepat, baik bila dibandingkan dengan data tahun 2004 ($r=3,67$) akan tetapi menurun bila dibandingkan dengan data tahun 2009 ($r=-0,35$).
 - g. Perkembangan laju pencapaian indeks tingkat pendidikan Kabupaten Jombang pada tahun 2010 tergolong cepat bila dibandingkan dengan data tahun 2004 ($r=2,93$) akan tetapi tergolong sangat lambat apabila dibandingkan dengan data tahun 2009 ($r=0,11$). Artinya bahwa terjadi perlambatan laju pertumbuhan laju pencapaian indeks tingkat pendidikan di Kabupaten Jombang pada tahun ini.
 - h. Sebaliknya perkembangan laju pencapaian indeks PPP Kabupaten Jombang tahun 2010 tergolong sangat lambat bila dibandingkan dengan data tahun 2004 ($r=0,96$) akan tetapi tergolong cepat apabila dibandingkan dengan data tahun 2009 ($r=4,33$). Artinya bahwa terjadi percepatan laju pertumbuhan pencapaian indeks PPP di Kabupaten Jombang pada tahun 2010.
 - i. Berdasarkan perbandingan data hasil perhitungan IPM tahun 2010 dan angka proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang tahun 2010 dengan data IPM dan angka laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur tahun 2009, diketahui bahwa posisi relatif Kabupaten Jombang masih berada di kuadran II (72,86;4,94). Artinya bahwa pencapaian hasil pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi Kabupaten Jombang pada tahun 2010 secara relatif masih berada diatas rata-

- rata pencapaian daerah lain di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2009.
- j. Hasil perhitungan IPM kecamatan se-Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa besaran IPM tertinggi diraih oleh Kecamatan Jombang yaitu sebesar 77,10. Sedangkan besaran IPM terendah diraih oleh Kecamatan Kabuh yaitu sebesar 65,18.
 - k. Mayoritas status raihan IPM kecamatan di Kabupaten Jombang adalah tingkat menengah atas, yakni diraih oleh sejumlah 19 kecamatan (90,48%). Sisanya terdapat 2 kecamatan yang status raihan IPM-nya tergolong menengah bawah yakni Kecamatan Kabuh (65,18) dan Kecamatan Wonosalam (65,81).
 - l. Berdasarkan perbandingan data IPM tahun 2010 dan PDRB ADHB tahun 2007 antara capaian kecamatan dan rata-rata kabupaten diketahui bahwa terdapat 2 kecamatan yang mempunyai posisi relatif di kuadran I yakni Kecamatan Jombang dan Peterongan, dan terdapat 2 (dua) kecamatan yang berada di kuadran II yaitu Kecamatan Gudo dan Jogoroto, serta 4 (empat) kecamatan berada di kuadran IV yakni Kecamatan Diwek, Ngoro, Mojoagung dan Ploso. Sementara sisanya yakni 12 Kecamatan berada di kuadran III. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat indikasi adanya disparitas tingkat capaian hasil pembangunan manusia dan hasil pembangunan ekonomi diantara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Jombang.
 - m. Besaran indeks harapan hidup tertinggi diraih oleh Kecamatan Jombang yaitu sebesar 78,97 sedangkan yang terendah terdapat pada Kecamatan Wonosalam yaitu sebesar 61,98. Diketahui pula bahwa terdapat 20 kecamatan yang status raihan indeks harapan hidup-nya tergolong dalam klasifikasi tingkat menengah atas

serta terdapat 1 kecamatan yang tergolong tingkat menengah bawah yakni Kecamatan Wonosalam.

- n. Besaran indeks tingkat pendidikan tertinggi diraih oleh Kecamatan Jombang dengan besaran 87,82 sedangkan yang terendah diraih oleh Kecamatan Kabuh dengan raihan sebesar 64,82. Diketahui pula bahwa terdapat 6 kecamatan yang meraih status indeks tingkat pendidikan dengan klasifikasi tingkat atas yakni Kecamatan Jombang, Peterongan, Diwek, Jogoroto Gudo, dan Perak serta terdapat 15 kecamatan (71,43%) yang tergolong dalam klasifikasi tingkat menengah atas dan terdapat 1 (satu) kecamatan yang masih tergolong tingkat menengah bawah yakni Kecamatan Kabuh.
- o. Besaran indeks AMH tertinggi diraih oleh Kecamatan Gudo yaitu sebesar 97,87 sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Kabuh yakni sebesar 81,73. Diketahui pula bahwa seluruh kecamatan (100%) di Kabupaten Jombang status raihan indeks AMH-nya tergolong dalam klasifikasi tingkat atas yakni pada kisaran angka 81,73 sd. 97,87.
- p. Besaran indeks MYS tertinggi diraih oleh Kecamatan Jombang yakni sebesar 68,43 sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Kabuh yakni sebesar 30,98. Terlihat pula bahwa mayoritas status indeks MYS kecamatan se-Kabupaten Jombang masih tergolong tingkat rendah, terdapat 15 kecamatan (71,43%) yang status indeks MYS nya tergolong tingkat rendah serta terdapat 5 kecamatan yang berstatus tingkat menengah bawah. Hanya 1 kecamatan yakni Kecamatan Jombang yang status indeks MYS-nya tergolong tingkat menengah atas.
- q. Besaran indeks PPP yang tertinggi diraih oleh Kecamatan Tembelang yaitu sebesar 64,95 sedangkan yang terendah terdapat

di Kecamatan Jogoroto yakni sebesar 61,67. Akan tetapi juga terlihat bahwa status capaian indeks PPP seluruh kecamatan (100%) masih tergolong dalam klasifikasi menengah bawah yakni berkisar antara 64,95 sd. 61,67.

- r. Secara umum prioritas dan fokus program-program pembangunan manusia di Kabupaten Jombang hendaknya diarahkan pada kecamatan Kabuh dan Wonosalam, dimana kedua kecamatan tersebut status capaian IPM-nya masih tergolong menengah bawah. Sedangkan apabila dipilah secara rinci, fokus program pembangunan di bidang kesehatan hendaknya diarahkan pada kecamatan wonosalam dimana status capaian indeks harapan hidupnya masih tergolong menengah bawah. Adapun fokus program pembangunan di bidang pendidikan hendaknya diarahkan pada kecamatan kabuh dimana status capaian indeks tingkat pendidikannya masih tergolong menengah bawah, sedangkan untuk program pembangunan ekonomi perlu upaya yang lebih masif dan terarah pada seluruh kecamatan dikarenakan status capaian indeks kemampuan daya beli di seluruh kecamatan masih tergolong menengah bawah.

6.2. REKOMENDASI

- a. Berdasarkan analisa terhadap hasil perhitungan IPM Kabupaten Jombang tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat peningkatan hasil pembangunan manusia di Kabupaten Jombang. Bahkan kecepatan perkembangan (perubahan)-nya tergolong dalam kategori cepat. Hanya saja kedepan hendaknya fokus pembangunan diarahkan pada upaya mendorong peningkatan daya beli masyarakat serta pada pembangunan sektor pendidikan khususnya upaya meningkatkan rata-rata lama

sekolah. Kedepan juga penting untuk menfokuskan pembangunan di bidang kesehatan pada upaya-upaya mengembalikan pertumbuhan positif angka harapan hidup masyarakat.

- b. Upaya mendorong daya beli masyarakat seyogyanya difokuskan pada pembangunan di sektor pertanian dan di sektor perdagangan khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini mengingat point strategis kedua sektor tersebut sebagai penyangga perekonomian melalui peranannya sebagai penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Jombang.
- c. Kebijakan penguatan dan intensifikasi pembangunan pertanian harus diarahkan pada upaya meningkatkan hasil produksi (panen) petani serta meningkatkan nilai tukar produk pertanian bila dibandingkan dengan produk non pertanian. Beberapa program yang penting untuk segera direalisasikan adalah:
 1. Perbaiki sistem budidaya pertanian guna mendorong tingkat efisiensi biaya dan meningkatkan hasil produksi, melalui intensifikasi kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani, peningkatan mutu kompetensi dan penambahan kuantitas petugas penyuluh lapangan (PPL) serta adopsi inovasi baru dalam bidang budidaya pertanian.
 2. Peningkatan upaya pengendalian hama dan penyakit khususnya pada penyakit bule yang menyerang tanaman jagung, hama tikus dan kerusakan produksi tembakau akibat curah hujan yang tinggi.
 3. Pengendalian harga dan pengawasan kualitas saprodi guna menurunkan biaya produksi khususnya pada item

- benih/bibit, pupuk, obat-obatan pertanian dan pakan (untuk peternakan dan perikanan).
4. Penyempurnaan sistem distribusi saprodi agar lebih tepat waktu dan tepat sasaran melalui pengawasan dan pemotongan jalur tataniaga saprodi.
 5. Perbaikan dan pengawasan sistem tataniga produksi pertanian guna mengeliminir anjloknya harga disaat panen diantaranya melalui pengadaan sistem informasi harga produksi yang dapat diakses hingga pelosok pedesaan, penegakan implementasi aturan yang terkait dengan harga dasar produk pertanian dan pembangunan sentra-sentra tataniaga pertanian baru.
 6. Perbaikan perlakuan pasca panen atas hasil produksi pertanian sehingga dimungkinkan hasil produksi tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah akan tetapi telah diolah menjadi bahan olahan setengah jadi.
- d. Sementara itu kebijakan yang mendorong sektor perdagangan hendaknya diarahkan pada penguatan dan pengembangan skala dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Beberapa program yang dapat dilaksanakan adalah:
1. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan revitalisasi kinerja UMKM dan koperasi.
 2. Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi para remaja khususnya dari golongan masyarakat yang tidak menamatkan SMA/SMK/MA.
 3. Program pemberdayaan usaha mikro untuk rumah tangga miskin.
 4. Penguatan sistem promosi dan kerjasama investasi di bidang UMKM dan koperasi.

5. Pengembangan UMKM dan koperasi mandiri melalui penyediaan tenaga pendamping dan kegiatan peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan.
 6. Pengembangan pasar tradisional melalui penambahan/ perluasan jumlah stand maupun pembangunan pasar tradisional baru.
 7. Pengembangan sentra UMKM baru yang berbasis pada potensi lokal.
- e. Hal lain yang penting dilakukan dalam mendorong daya beli masyarakat melalui pembangunan di sektor pertanian dan sektor perdagangan khususnya UMKM adalah pada aspek penguatan permodalan melalui penyediaan fasilitas pinjaman modal dengan tingkat suku bunga yang terjangkau serta tanpa angunan misalnya melalui pemberian fasilitas modal bergulir dalam jumlah yang cukup melalui institusi swadaya sosial yang telah ada dan terpercaya di tingkat desa misalnya jam'iyah yasinan/keagamaan, rukun kematian, paguyuban ibu-ibu PKK, Posyandu dll..
- f. Untuk sektor pendidikan, perlu kiranya diprioritaskan pemberian penambahan alokasi anggaran pembangunan di bidang pendidikan luar sekolah guna mendorong laju peningkatan rata-rata lama sekolah utamanya melalui program kegiatan :
1. Penambahan jumlah institusi pendidikan luar sekolah (kelompok belajar /kejar paket) khususnya paket A, bahkan bilamana perlu disetiap kecamatan terdapat minimal satu institusi.
 2. Penyempurnaan sistem sosialisasi dan rekrutmen peserta didik kejar paket dengan mengoptimalkan jaringan aparatur

- desa/dusun serta pemberian insentif bagi peserta didik kejar paket.
3. Penyempurnaan kurikulum dan implementasi inovasi pendidikan dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) program paket
 4. Perbaikan sarana prasarana pendidikan luar sekolah (kejar paket).
- g. Diluar itu, untuk mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah juga perlu kiranya dilakukan melalui penyusunan peraturan daerah (perda) yang mewajibkan anak-anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan hingga jenjang SMA/MA/SMK serta yang mewajibkan masyarakat golongan dewasa yang belum menempuh atau tidak menyelesaikan pendidikan formal setingkat SMP/MTs agar mengikuti program pendidikan luar sekolah yakni kelompok belajar (kejar) paket A dan B.
- h. Hal lain yang perlu dilakukan dalam pembangunan di bidang pendidikan adalah meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah melalui:
1. Perbaikan kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
 2. Penyempurnaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan (perpustakaan, laboratorium dll.) serta
 3. Penguatan muatan kurikulum berbasis potensi lokal dan adaptif dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan..
- i. Guna mendorong peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Jombang, perlu kiranya program pembangunan di

bidang kesehatan difokuskan pada upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya :

1. Penguatan promosi dan kegiatan advokasi perilaku hidup / lingkungan bersih dan sehat melalui peningkatan intensitas kegiatan penyuluhan kesehatan, pendampingan masyarakat serta pengadaan kader pelopor perilaku hidup / lingkungan bersih dan sehat.
 2. Peningkatan mutu dan cakupan layanan kesehatan bagi penduduk golongan lanjut usia dan pra lanjut usia baik pada aspek layanan pengobatan maupun aspek pencegahan dan pemeliharaan kesehatan melalui penambahan dan penguatan kelembagaan posyandu lansia, penyediaan sarana olahraga untuk masyarakat umum dan layanan kesehatan *home care*.
 3. Penyediaan asuransi kesehatan bagi seluruh penduduk miskin melalui penyederhanaan sistem administrasi pendaftaran (bila mana perlu jemput bola), peningkatan intensitas sosialisasi program serta penyediaan alokasi anggaran yang memadai.
 4. Penambahan jumlah dan mutu kompetensi tenaga kesehatan sebagaimana standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam Indikator Indonesia Sehat 2010.
 5. Penguatan dan pengembangan kapasitas dan kelembagaan serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program desa siaga dan sanitasi total berbasis masyarakat.
- j. Berdasarkan hasil perhitungan IPM kecamatan se-Kabupaten Jombang diketahui bahwa secara umum status raihan besaran IPM-nya tergolong tingkat menengah atas. Akan tetapi masih terdapat 2 (dua) kecamatan yang masih tertinggal bila

dibandingkan dengan kecamatan lainnya yakni Kecamatan Kabuh dan Wonosalam. Untuk itu secara umum program-program pembangunan manusia di Kabupaten Jombang hendaknya difokuskan pada kedua kecamatan tersebut.

- k. Secara rinci bila dianalisis berdasarkan peta sebaran masing-masing komponen indeks penyusun IPM diketahui bahwa secara umum status raihan indeks harapan hidup kecamatan se-Kabupaten Jombang berada pada status menengah atas kecuali untuk Kecamatan Wonosalam Untuk itu seyogyanya pada tahun mendatang program pembangunan manusia di bidang kesehatan lebih difokuskan kepada Kecamatan Wonosalam.
- l. Sedangkan untuk komponen indeks tingkat pendidikan secara umum status raihan kecamatan se-Kabupaten Jombang adalah tingkat menengah atas. Hanya saja pada komponen ini secara umum terdapat 1 (satu) kecamatan yang masih sebagai daerah yang masih tertinggal yakni Kecamatan Kabuh. Bahkan Secara lebih rinci, diketahui bahwa status capaian indeks AMH kecamatan se-Kabupaten Jombang telah berada pada kategori tingkat atas. Akan tetapi sebaliknya status capaian indeks MYS kecamatan se-Kabupaten Jombang masih berada pada kategori tingkat rendah. Secara detil sebaran daerah tertinggal pada indeks MYS berada pada 15 kecamatan yakni Kecamatan Kabuh, Sumobito, Mojoagung, Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Ngoro, Bandar Kedungmulyo, Tembelang, Kesamben, Megaluh, Ploso, Kudu, Ngusikan, dan Plandaan. Sehingga dengan begitu, sepatutnya program pembangunan pendidikan khususnya yang terkait dengan upaya mendongkrak rata-rata lama sekolah diarahkan secara lebih intensif kepada 15 kecamatan tersebut.

m. Untuk komponen indeks kemampuan daya beli (pendapatan/PPP) kecamatan se-Kabupaten Jombang diketahui bahwa pada tahun 2010 ini capaian indeks PPP-nya berkisar antara 61,67 sd. 64,95. Hal ini menandakan bahwa status capaian indeks PPP seluruh kecamatan masih berada dalam kategori menengah bawah. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan daya beli masyarakat secara masif di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang khususnya melalui pengutan laju perkembangan sektor pertanian dan sektor perdagangan khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di seluruh wilayah kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- , United Nation Development Programme (UNDP), **“Human Development Report 1994”**, Oxford University Press, New York
- , **“Undang-Undang RI No. 20, Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional”**, DEPDIKNAS, Jakarta.
- , **“Kabupaten Jombang Dalam Angka Tahun 2004 sd. 2009”**, BPS Kabupaten Jombang, Jombang.
- , **“Propinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2004 sd. 2009”**, BPS Propinsi Jawa Timur, Surabaya.
- , **“Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 sd. 2009”**, BPS Propinsi Jawa Timur, Surabaya.
- , **“laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 sd. 2009”**, BPS Propinsi Jawa Timur, Surabaya.
- , **“Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007”**, Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia.
- , **“Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007”**, DEPDIKNAS, Jakarta.
- , **“Profil Kabupaten Jombang Tahun 2008”**, BAPPEDA dan BPS Kabupaten Jombang, Jombang.
- , **“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2009”**, Pemerintah Kabupaten Jombang, Jombang.
- , **“Profil Kesehatan 2009”**, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jombang
- , **“Profil Pendidikan 2009”**, Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Jombang
- , **“Indikator Prioritas Pembangunan Ekonomi Jawa Timur 2009”**, BPS Propinsi Jawa Timur, Surabaya.

- Arikunto, Suharsimi, 2006, **"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"**, Jakarta, PT. Rieneka Cipta,
- Endarto S, 2008, **"Pengantar Menuju Reformasi Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten Dan Kota"**, Sajogyo Institute (SAINS), Bogor Jawa Barat.
- Haris S, 2009, **"Modul 1 Pengembangan Profesi Guru (PPG)"**, UNESA, Surabaya.
- Mardiyah, Siti, MA, **"Konsep Indeks Pembangunan Manusia, Tiga Dimensi Pokok Pembangunan Manusia"**, Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, Surabaya, Oktober, 2001
- Sugiarto, Abuzar Asro, **"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, Perbandingan Antar Propinsi (1990-1993)"**, Diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik, Jakarta, 1996
- Sumarso, Soni, Drs, MDM & Drs. Sahat Marulitua, MA, **"Index Pembangunan Manusia dan Pemanfaatannya Dalam Pembangunan Daerah"**, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Depdagri dan Otda, Jakarta, 2003.

KOMPONEN IPM KAB JOMBANG TAHUN 2010

Kode	Kecamatan	AHH (Eo)	AMH	MYS	PPP adj
1	Jombang	72,38	97,52	10,26	639.081
2	Peterongan	71,74	96,92	8,09	631.655
3	Diwek	67,62	94,33	7,70	637.616
4	Jogoroto	70,88	95,59	7,75	626.875
5	Sumobito	67,87	94,92	7,17	637.123
6	Mojogagung	71,31	87,69	7,32	629.922
7	Mojowarno	69,03	93,08	7,40	634.981
8	Bareng	66,08	94,53	6,58	635.473
9	Wonosalam	62,19	88,12	5,47	639.268
10	Ngoro	70,46	90,97	6,36	634.367
11	Gudo	72,28	97,87	8,85	635.515
12	Perak	68,01	96,99	8,73	631.287
13	Bandar KDM	70,47	86,89	6,76	637.662
14	Tembelang	66,94	93,26	6,47	641.043
15	Kesamben	70,10	94,99	6,31	633.526
16	Megaluh	65,70	85,52	7,15	639.050
17	Ploso	69,39	86,25	6,71	630.768
18	Kabuh	65,27	81,73	4,65	635.307
19	Kudu	69,60	89,51	5,56	635.706
20	Ngusikan	67,07	84,47	6,61	639.240
21	Plandaan	70,43	89,77	6,02	635.954
Kabupaten		71,18	92,89	7,40	633.703

IPM KAB JOMBANG TAHUN 2010

Indeks Eo	Indeks AMH	Indeks MYS	Indeks Tingkat Pendidikan	Indeks PPP	IPM
78,97	97,52	68,43	87,82	64,49	77,10
77,90	96,92	53,93	82,59	62,78	74,42
71,03	94,33	51,35	80,00	64,16	71,73
76,47	95,59	51,68	80,95	61,67	73,03
71,45	94,92	47,81	79,22	64,04	71,57
77,18	87,69	48,80	74,73	62,38	71,43
73,39	93,08	49,32	78,49	63,55	71,81
68,46	94,53	43,88	77,65	63,66	69,92
61,98	88,12	36,47	70,90	64,54	65,81
75,76	90,97	42,42	74,79	63,41	71,32
78,80	97,87	58,97	84,90	63,67	75,79
71,68	96,99	58,17	84,05	62,69	72,81
75,78	86,89	45,05	72,94	64,17	70,96
69,90	93,26	43,17	76,56	64,95	70,47
75,17	94,99	42,10	77,36	63,21	71,91
67,83	85,52	47,67	72,91	64,49	68,41
73,98	86,25	44,74	72,41	62,57	69,66
67,11	81,73	30,98	64,82	63,62	65,18
74,34	89,51	37,05	72,02	63,71	70,03
70,12	84,47	44,06	71,00	64,53	68,55
75,71	89,77	40,11	73,22	63,77	70,90
76,96	92,89	49,31	78,36	63,25	72,86

AHH = Angka Harapan Hidup sejak Lahir (Tahun)

AMH = Angka Melek Huruf

MYS = Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

PPP = Kemampuan Daya Beli (Rp)

STATUS TINGKAT CAPAIAN (STC) IPM KAB JOMBANG TAHUN 2010

Kecamatan	Indeks Eo	STC	Indeks AMH	STC	Indeks MYS	STC	Indeks TP	STC	Indeks PPP	STC	IPM	STC
Jombang	78,97	MA	97,52	A	68,43	MA	87,82	A	64,49	MB	77,10	MA
Peterongan	77,90	MA	96,92	A	53,93	MB	82,59	A	62,78	MB	74,42	MA
Diwek	71,03	MA	94,33	A	51,35	MB	80,00	A	64,16	MB	71,73	MA
Jogoroto	76,47	MA	95,59	A	51,68	MB	80,95	A	61,67	MB	73,03	MA
Sumobito	71,45	MA	94,92	A	47,81	R	79,22	MA	64,04	MB	71,57	MA
Mojoagung	77,18	MA	87,69	A	48,80	R	74,73	MA	62,38	MB	71,43	MA
Mojowarno	73,39	MA	93,08	A	49,32	R	78,49	MA	63,55	MB	71,81	MA
Bareng	68,46	MA	94,53	A	43,88	R	77,65	MA	63,66	MB	69,92	MA
Wonosalam	61,98	MB	88,12	A	36,47	R	70,90	MA	64,54	MB	65,81	MB
Ngoro	75,76	MA	90,97	A	42,42	R	74,79	MA	63,41	MB	71,32	MA
Gudo	78,80	MA	97,87	A	58,97	MB	84,90	A	63,67	MB	75,79	MA
Perak	71,68	MA	96,99	A	58,17	MB	84,05	A	62,69	MB	72,81	MA
Bandar KDM	75,78	MA	86,89	A	45,05	R	72,94	MA	64,17	MB	70,96	MA
Tembelang	69,90	MA	93,26	A	43,17	R	76,56	MA	64,95	MB	70,47	MA
Kesamben	75,17	MA	94,99	A	42,10	R	77,36	MA	63,21	MB	71,91	MA
Megaluh	67,83	MA	85,52	A	47,67	R	72,91	MA	64,49	MB	68,41	MA
Ploso	73,98	MA	86,25	A	44,74	R	72,41	MA	62,57	MB	69,66	MA
Kabuh	67,11	MA	81,73	A	30,98	R	64,82	mb	63,62	MB	65,18	MB
Kudu	74,34	MA	89,51	A	37,05	R	72,02	MA	63,71	MB	70,03	MA
Ngusikan	70,12	MA	84,47	A	44,06	R	71,00	MA	64,53	MB	68,55	MA
Plandaan	75,71	MA	89,77	A	40,11	R	73,22	MA	63,77	MB	70,90	MA
KABUPATEN	76,96	MA	92,89	A	49,31	R	78,36	MA	63,25	MB	72,86	MA

R = Rendah
 MB = Menengah Bawah
 MA = Menengah Atas
 A = Atas

Perbandingan IPM Kecamatan se-Kabupaten Jombang Tahun 2010 dan 2009

Kecamatan	Indeks Eo		Indeks AMH		Indeks MYS		Indeks TP		Indeks PPP		IPM							
	2010	2009	(+/-)	2010	2009	(+/-)	2010	2009	(+/-)	2010	2009	(+/-)						
Jombang	78,97	79,00	(0,03)	97,52	97,49	0,03	68,43	68,41	0,02	87,82	87,80	0,02	64,49	63,34	1,15	77,10	76,71	0,39
Peterongan	77,90	77,94	(0,04)	96,92	96,89	0,03	53,93	53,92	0,01	82,59	82,57	0,02	62,78	62,25	0,53	74,42	74,25	0,17
Diwek	71,03	71,06	(0,03)	94,33	94,30	0,03	51,35	51,34	0,01	80,00	79,98	0,02	64,16	62,55	1,61	71,73	71,20	0,53
Jogoroto	76,47	76,5	(0,03)	95,59	95,56	0,03	51,68	51,67	0,01	80,95	80,93	0,02	61,67	59,83	1,84	73,03	72,42	0,61
Sumobito	71,45	71,5	(0,05)	94,92	94,89	0,03	47,81	47,80	0,01	79,22	79,19	0,03	64,04	60,63	3,41	71,57	70,44	1,13
Mojoagung	77,18	77,21	(0,03)	87,69	87,65	0,04	48,80	48,78	0,02	74,73	74,70	0,03	62,38	63,04	(0,66)	71,43	71,65	(0,22)
Mojowarno	73,39	73,44	(0,05)	93,08	93,05	0,03	49,32	49,31	0,01	78,49	78,47	0,02	63,55	62,01	1,54	71,81	71,31	0,50
Barang	68,46	68,5	(0,04)	94,53	94,51	0,02	43,88	43,87	0,01	77,65	77,63	0,02	63,66	61,9	1,76	69,92	69,34	0,58
Wonosalam	61,98	62,00	(0,02)	88,12	88,10	0,02	36,47	36,46	0,01	70,90	70,88	0,02	64,54	62,99	1,55	65,81	65,29	0,52
Ngoro	75,76	75,78	(0,02)	90,97	90,94	0,03	42,42	42,40	0,02	74,79	74,76	0,03	63,41	61,64	1,77	71,32	70,73	0,59
Gudo	78,80	78,83	(0,03)	97,87	97,84	0,03	58,97	58,95	0,02	84,90	84,88	0,02	63,67	62,13	1,54	75,79	75,28	0,51
Perak	71,68	71,71	(0,03)	96,99	96,96	0,03	58,17	58,15	0,02	84,05	84,02	0,03	62,69	63,06	(0,37)	72,81	72,93	(0,12)
Bandar KDM	75,78	75,85	(0,07)	86,89	86,87	0,02	45,05	45,04	0,01	72,94	72,93	0,01	64,17	62,69	1,48	70,96	70,49	0,47
Tembelang	69,90	69,92	(0,02)	93,26	93,23	0,03	43,17	43,15	0,02	76,56	76,54	0,02	64,95	62,94	2,01	70,47	69,8	0,67
Kesamben	75,17	75,22	(0,05)	94,99	94,96	0,03	42,10	42,08	0,02	77,36	77,33	0,03	63,21	61,47	1,74	71,91	71,34	0,57
Megaluh	67,83	67,89	(0,06)	85,52	85,49	0,03	47,67	47,65	0,02	72,91	72,88	0,03	64,49	60,91	3,58	68,41	67,23	1,18
Ploso	73,98	74,00	(0,02)	86,25	86,22	0,03	44,74	44,72	0,02	72,41	72,39	0,02	62,57	62,36	0,21	69,66	69,58	0,08
Kabuh	67,11	67,17	(0,06)	81,73	81,71	0,02	30,98	30,97	0,01	64,82	64,8	0,02	63,62	61,98	1,64	65,18	64,65	0,53
Kudu	74,34	74,39	(0,05)	89,51	89,47	0,04	37,05	37,04	0,01	72,02	71,99	0,03	63,71	62,32	1,39	70,03	69,57	0,46
Ngusikan	70,12	70,13	(0,01)	84,47	84,44	0,03	44,06	44,05	0,01	71,00	70,98	0,02	64,53	60,68	3,85	68,55	67,26	1,29
Plandaen	75,71	75,74	(0,03)	89,77	89,74	0,03	40,11	40,10	0,01	73,22	73,20	0,02	63,77	60,99	2,78	70,90	69,98	0,92
KABUPATEN	76,96	77,04	(0,08)	92,89	92,86	0,03	49,31	49,29	0,02	78,36	78,34	0,02	63,25	61,59	1,66	72,86	72,32	0,54

Hasil Perhitungan Reduksi Shortfall IPM Kabupaten Jombang

Basis Data	IPM t	IPM t+n	IPM Ideal	Reduksi	Kesimpulan
Tahun (t)				Shortfall (r)	
2004	68,40	72,86	100	14,11	cepat
2009	72,32	72,86	100	1,95	cepat

Hasil Perhitungan Reduksi Shortfall IPM Kecamatan Tahun 2010 (Basis Data 2009)

Kode	Kecamatan	Reduksi Short	Kesimpulan
1	Jombang	1,66	menengah
2	Peterongan	0,67	sangat lambat
3	Diwek	1,84	cepat
4	Jogoroto	2,22	cepat
5	Sumobito	3,82	cepat
6	Mojoagung	-0,79	<i>menurun</i>
7	Mojowarno	1,74	cepat
8	Bareng	1,90	cepat
9	Wonosalam	1,49	lambat
10	Ngoro	2,01	cepat
11	Gudo	2,07	cepat
12	Perak	-0,45	<i>menurun</i>
13	Bandar KDM	1,61	menengah
14	Tembelang	2,21	cepat
15	Kesamben	2,00	cepat
16	Megaluh	3,60	cepat
17	Ploso	0,25	sangat lambat
18	Kabuh	1,51	menengah
19	Kudu	1,50	lambat
20	Ngusikan	3,94	cepat
21	Plandaan	3,07	cepat

Hasil Perhitungan Reduksi Shortfall Indeks HH, Indeks TP dan Indeks PPP kab. Jombang

Basis Data	Reduksi Shortfall		
	Tahun (t)	Indeks HH	Indeks TP
2004	22,03	17,58	5,77
	cepat	cepat	cepat
2009	-0,35	0,11	4,33
	menurun	sangat lambat	cepat

Hasil Perhitungan Reduksi Shortfall Indeks HH, Indeks TP dan Indeks PPP tahun 2010 (basis data 2008)

Kode	Kecamatan	Reduksi Shortfall					
		Indeks HH	Kesimpulan	Indeks TP	Kesimpulan	Indeks PPP	Kesimpulan
1	Jombang	-0,15	menurun	0,20	sangat lambat	3,15	cepat
2	Peterongan	-0,17	menurun	0,11	sangat lambat	1,40	lambat
3	Diwek	-0,09	menurun	0,11	sangat lambat	4,29	cepat
4	Jogoroto	-0,13	menurun	0,12	sangat lambat	4,59	cepat
5	Sumobito	-0,19	menurun	0,14	sangat lambat	8,67	cepat
6	Mojoagung	-0,15	menurun	0,10	sangat lambat	-1,79	menurun
7	Mojowarno	-0,20	menurun	0,10	sangat lambat	4,05	cepat
8	Bareng	-0,13	menurun	0,09	sangat lambat	4,62	cepat
9	Wonosalam	-0,05	menurun	0,08	sangat lambat	4,18	cepat
10	Ngoro	-0,08	menurun	0,11	sangat lambat	4,60	cepat
11	Gudo	-0,12	menurun	0,16	sangat lambat	4,07	cepat
12	Perak	-0,11	menurun	0,19	sangat lambat	-0,99	menurun
13	Bandar KDM	-0,28	menurun	0,05	sangat lambat	3,96	cepat
14	Tembelang	-0,07	menurun	0,08	sangat lambat	5,42	cepat
15	Kesamben	-0,20	menurun	0,14	sangat lambat	4,52	cepat
16	Megaluh	-0,18	menurun	0,10	sangat lambat	9,15	cepat
17	Ploso	-0,08	menurun	0,09	sangat lambat	0,57	sangat lambat
18	Kabuh	-0,18	menurun	0,04	sangat lambat	4,32	cepat
19	Kudu	-0,20	menurun	0,12	sangat lambat	3,70	cepat
20	Ngusikan	-0,05	menurun	0,08	sangat lambat	9,79	cepat
21	Plandaan	-0,11	menurun	0,07	sangat lambat	7,13	cepat